

Inovasi Teknologi "Remote Sensing": Mengangkat Kembali Prestasi Agro Industri

Sukardi Rinakit

STUDI tentang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang seiring dengan munculnya kesadaran, bahwa hasil inovasi teknologi dapat mempercepat proses pembangunan suatu negara. Salah satu kurun waktu cukup penting dalam era pengembangan inovasi teknologi adalah setelah Perang Dunia II.¹ Kemajuan di bidang industri, pertanian, kedokteran, transportasi, sistem pertahanan, komunikasi dan energi dicapai dalam kurun waktu itu. Karena demikian pesatnya kemajuan teknologi, tak mengherankan jika dalam dasawarsa 1960-an muncul "euphoria"; yakni optimisme yang berlebihan, bahwa teknologi diyakini sebagai kekuatan sentral dan faktor kunci dalam pembangunan.²

Meskipun "euphoria" terhadap teknologi akhirnya disadari sebagai langkah yang tidak selalu tepat, peranan teknologi tetap penting dalam rangkaian proses mempercepat pembangunan. Terutama apabila suatu negara menginginkan revitalisasi kemampuan-kemampuan industri mereka, maka persoalan efisiensi, produktivitas dan kompetisi sebagai jalur bawah kehidupan ekonomi hanya dapat didekati dengan inovasi teknologi. Dengan meletakkan kerangka kerja seperti ini, isu inovasi teknologi menjadi sangat strategis dan relevan untuk dibicarakan.

Tulisan ini akan membahas inovasi teknologi yang berperan sebagai perekat antara kemajuan teknologi dan keberhasilan ekonomi di Indonesia dalam lingkup negara-negara ASEAN lainnya. Perhatian utama pembahasan adalah mengenai persoalan inovasi teknologi untuk meningkatkan prestasi agro industri Indonesia yang masih terbelakang bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Pada akhir tulisan dikemukakan beberapa alternatif kebijakan untuk mengangkat prestasi agro industri, khusus-

¹Lebih jauh tentang pendekatan dan pola pemikiran pada dekade ini, khususnya yang menyangkut hubungan industri dengan pembangunan ekonomi, lihat Hollis Chenery dan Moses Syrquin (eds.), *Patterns of Development, 1950-1970* (London: Oxford University Press, 1975).

²H. Tb. Bachtiar Rifai, "Peningkatan IPTEK Secara Terpadu, Terarah dan Serasi dalam Membina Ketahanan Nasional," *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Jakarta: LIPI, 1981), No. 1, hal. 21.

nya menyangkut pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh (*remote sensing*).

Posisi Agro-Industri vs Manufaktur

Dalam hal industri manufaktur, saat ini Indonesia telah tergeser oleh Thailand. Nilai

ekspor manufaktur Thailand dalam tahun 1988 telah mencapai US\$8,2 milyar, Malaysia US\$9,5 milyar dan Indonesia US\$5,5 milyar. Pada sektor ini posisi teratas ditempati Singapura dengan nilai ekspor US\$29 milyar. Sedangkan Filipina berada di bawah Indonesia, yaitu dengan total nilai ekspor manufaktur US\$4,4 milyar. (lihat Tabel 1 dan Grafik 1).

Tabel 1

PERBANDINGAN STRUKTUR EKSPOR, INDONESIA DAN NEGARA ASEAN LAINNYA, 1984-1988

(dalam Harga Berlaku)

(dalam Juta US\$)

	1984	1985	1986	1987	1988	Pertumbuhan
INDONESIA						
Ekspor, Fob	20.345	18.711	14.787	17.206	19.504	-1,05
Ekspor Barang Primer	3.585	3.753	3.826	4.025	5.439	10,98
Ekspor Minyak	14.598	12.503	8.097	8.843	8.530	-12,57
Ekspor Industri Pengolahan	2.162	2.455	2.864	4.338	5.535	26,49
MALAYSIA						
Ekspor, Fob	16.484	15.632	13.830	17.911	21.110	6,38
Ekspor Barang Primer	7.146	6.432	5.518	7.273	8.344	3,95
Ekspor Minyak	4.933	4.930	3.160	3.572	3.233	-10,02
Ekspor Industri Pengolahan	4.404	4.271	5.152	7.066	9.533	21,30
FILIPINA						
Ekspor, Fob	5.391	4.629	4.842	5.649	7.074	7,03
Ekspor Barang Primer	2.330	1.951	1.972	2.083	2.530	2,08
Ekspor Minyak	82	35	62	80	144	15,12
Ekspor Industri Pengolahan	2.979	2.644	2.808	3.486	4.400	10,24
SINGAPURA						
Ekspor, Fob	24.055	22.815	22.428	28.592	39.205	12,99
Ekspor Barang Primer	4.102	3.343	3.169	3.592	5.193	6,07
Ekspor Oil	6.162	6.156	4.587	4.523	4.889	-5,62
Ekspor Industri Pengolahan	13.791	13.317	14.672	20.477	29.123	20,55
MUANGTHAI						
Ekspor, Fob	7.413	7.121	8.835	11.659	15.869	20,96
Ekspor Barang Primer	4.780	7.121	8.835	11.659	15.869	20,96
Ekspor Oil	50	99	70	85	80	12,47
Ekspor Industri Pengolahan	2.583	2.800	3.944	6.125	8.192	33,45

Sumber: Diolah dari World Table, *Social-Economic Indicators*, 1989.

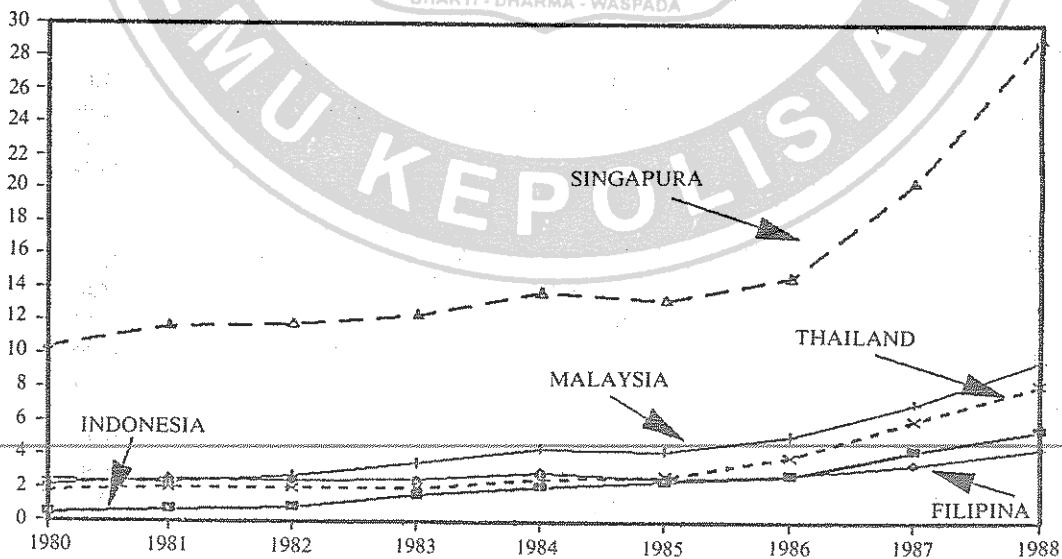
Meskipun Indonesia dalam hal ekspor manufaktur masih berada pada posisi tengah dan sumbangan ekspor manufaktur terhadap total ekspor hanya sekitar 30%, tetapi pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia dalam tahun 1984-1988 menempati posisi kedua di bawah Thailand yang pertumbuhan rata-ratanya sekitar 33,45%. Thailand dan Malaysia dalam hal industri manufaktur memang telah berada di atas Indonesia. Kedua negara ini sudah berada pada gelanggang kelompok *Newly Industrialized Countries* (NICs) dengan sumbangan ekspor manufaktur lebih dari 40% dari total ekspor. Sedangkan Singapura tetap memimpin dalam ekspor manufaktur yang berperan sekitar 75% dari total ekspor.

Berbeda dengan pertumbuhan yang terjadi pada industri manufaktur, ekspor agro-

industri Indonesia memberikan sumbangan yang tidak begitu besar pada total ekspor. Tahun 1988 sumbangan yang diberikan sebesar US\$5,4 milyar. Angka ini sedikit di atas Singapura (US\$5,1 milyar). Keberhasilan Singapura mendekati Indonesia dalam ekspor agro-industri menunjukkan keberhasilan jaringan pemasaran dan *trading house* negara tersebut karena pada dasarnya negara ini tidak mempunyai lahan untuk mengembangkan beberapa jenis tanaman seperti rempah-rempah, kopi, karet dan lain-lain. Singapura hanya melakukan re-ekspor komoditi pertanian terutama dari Filipina dan Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Indonesia relatif terbelakang dalam hal ekspor agro-industri. Malaysia misalnya, mampu menghasilkan US\$8,3 milyar pada tahun 1988. Thailand di urutan kedua dengan sum-

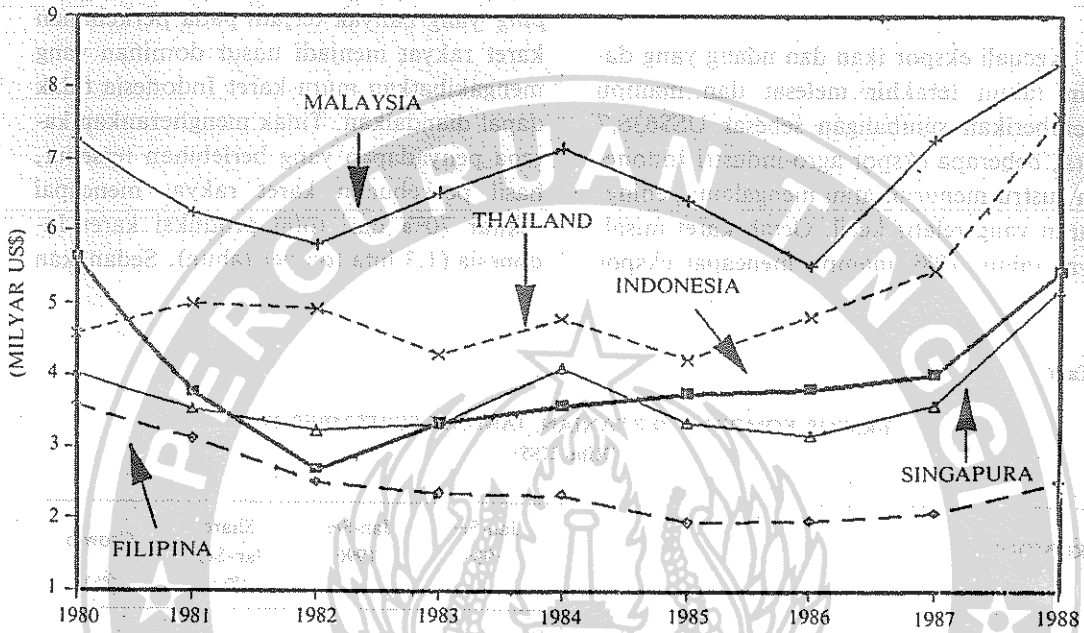
Grafik 1

EKSPOR PRODUK INDUSTRI MANUFAKTUR
ASEAN, 1980-1988



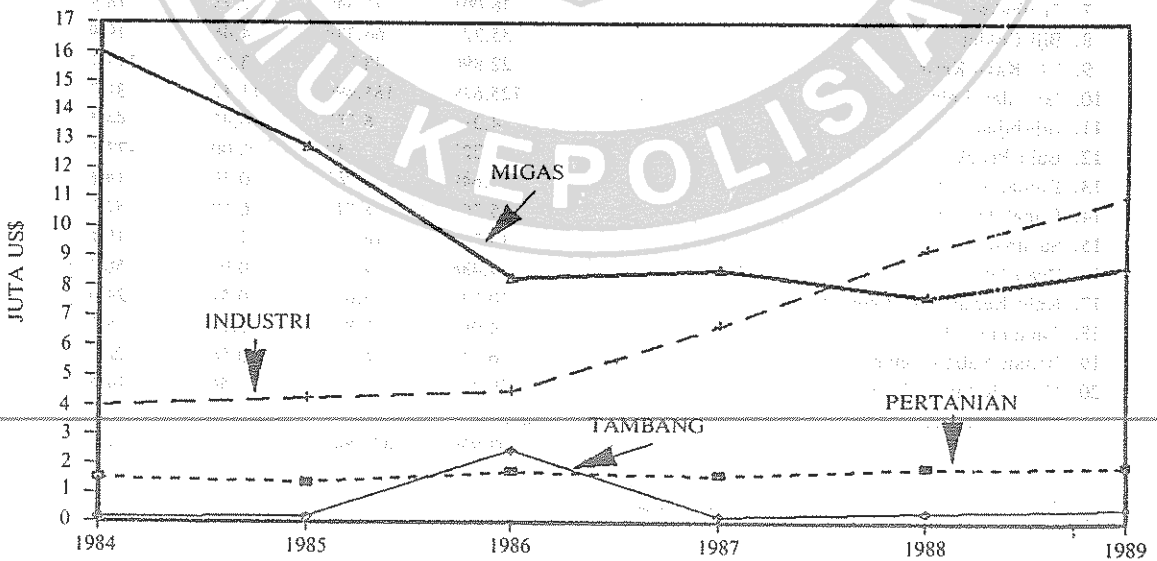
Grafik 2

EKSPOR PRODUK PRIMER (PERTANIAN & TAMBANG) ASEAN, 1980-1988



Grafik 3

EKSPOR INDONESIA MENURUT SEKTOR TAHUN 1984-1989



bangun hasil ekspor sebesar US\$7,5 milyar. Posisi terendah ditempati Filipina yaitu US\$2,5 milyar (lihat Grafik 2 dan 3).

Kecuali ekspor ikan dan udang yang dalam tahun terakhir melesat dan mampu memberikan sumbangan sebesar US\$636,7 juta, beberapa ekspor agro-industri Indonesia justru menurun atau mengalami peningkatan yang relatif kecil. Getah karet misalnya, tahun 1989 mampu mencapai ekspor

US\$39 juta tetapi tahun 1990 turun menjadi US\$26,2 juta. Penurunan yang terjadi ini mungkin disebabkan karena tidak stabilnya mutu karet Indonesia. Persoalan *over tapping* yang banyak terjadi pada perkebunan karet rakyat menjadi unsur dominan yang mengakibatkan mutu karet Indonesia tidak dapat diandalkan. Tidak mengherankan karena penyadapan yang berlebihan tersebut, hasil perkebunan karet rakyat mencapai sekitar 70% dari total produksi karet Indonesia (1,3 juta ton per tahun). Sedangkan

Tabel 2

EKSPOR KOMODITI PERTANIAN, JANUARI-SEPTEMBER 1990
(Ribu US\$)

KOMODITI	Jan-Sep 1989	Jan-Sep 1990	Share Jan-Sep (%)	Growth (%)
1. Getah Karet	39.098	26.218	1,76	-32,9
2. Kopi	409.465	282.453	18,98	-31,0
3. Kayu Bulat	337	72	0,00	-78,6
4. Udang Segar/Beku	412.928	471.299	31,68	14,1
5. Teh	116.736	130.743	8,79	12,0
6. Rempah-rempah	143.666	112.814	7,58	-21,5
7. Tembakau	36.001	41.349	2,78	14,9
8. Biji Coklat	55.328	66.339	4,46	19,9
9. Ubi Kayu Kering	22.890	48.777	3,28	113,1
10. Ikan dan Lainnya	125.629	165.490	11,12	31,7
11. Biji-bijian	4.213	6.089	0,41	44,5
12. Bulu Bebek	227	52	0,00	-77,1
13. Damar & Getah Damar	7.649	8.763	0,59	14,6
14. Kopal dan Lain-lain	5.707	8.713	0,59	52,7
15. Sayur-sayuran	13.799	16.499	1,11	19,6
16. Buah-buahan	9.486	14.244	0,96	50,2
17. Kulit Kerang dan Lain-lain	10.546	8.011	0,54	-24,0
18. Tanaman Obat	4.081	3.826	0,26	-6,2
19. Bahan Nabati Lainnya	6.744	8.284	0,56	22,8
20. Hasil Pertanian Lainnya	79.406	67.805	4,56	-14,6
	1.503.936	1.487.840	100,0	-1,1

Sumber: Data Ekspor diolah dari Data BPS 1990.

perkebunan negara menghasilkan 18,2% (sekitar 235 ribu ton), dan perkebunan

swasta 12,2% atau 157 ribu ton (lihat Tabel 2 dan 3).

Tabel 3

PRODUKSI PERKEBUNAN SELURUH INDONESIA MENURUT PROPINSI DAN STATUS PENGUSAHAAN JENIS TANAMAN KARET DAN KELAPA TAHUN 1988

(dalam Ton)

No. Propinsi	KARET				KELAPA			
	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Negara	Perkebunan Swasta	Jumlah	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Negara	Perkebunan Swasta	Jumlah
1. DI Aceh	14.442	3.143	2.007	19.592	49.933	0	0	49.933
2. Sumatera Utara	173.090	119.801	125.882	418.773	89.173	1.645	2.505	93.323
3. Sumatera Barat	37.612	0	325	37.937	62.625	0	170	62.795
4. Riau	95.505	1.379	2.700	99.584	194.320	0	225	194.545
5. Jambi	169.609	460	1.140	171.209	96.637	600	90	97.327
6. Sumatera Selatan	169.195	7.944	2.241	179.380	18.900	0	2	18.902
7. Bengkulu	16.783	0	0	16.783	7.530	0	0	7.530
8. Lampung	9.208	24.027	490	33.725	108.196	1.434	242	109.872
9. Jawa Barat	8.079	30.638	9.001	47.718	96.338	8.769	340	105.447
10. Jawa Tengah	78	28.887	4.051	33.016	162.316	9.824	170	172.310
11. DI Yogyakarta	0	0	0	0	37.316	0	0	37.316
12. Jawa Timur	0	15.206	6.199	21.405	174.846	755	243	175.844
13. Bali	0	0	129	129	58.966	0	850	59.815
14. NTB	0	0	0	0	32.500	0	74	32.574
15. NTT	0	0	0	0	45.162	0	222	45.384
16. Kalbar	115.621	0	400	116.021	42.701	0	0	42.701
17. Kalteng	52.780	0	0	52.780	16.035	0	3	38.715
18. Kalsel	35.866	4.020	574	40.460	38.712	0	3	38.715
19. Kaltim	3.817	0	0	3,817	14.001	0	0	14,001
20. Sulawesi Utara	0	0	0	0	239.550	0	7.950	247.500
21. Sulawesi Tengah	0	0	0	0	146.084	0	1.045	147.129
22. Sulawesi Selatan	0	0	2.163	2.163	101.184	300	885	102.369
23. Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	31.050	300	168	31.218
24. Maluku	0	0	0	0	195.884	1.418	979	198.281
25. Irian Jaya	135	0	0	135	14.625	0	0	14.625
26. DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Timor Timur	0	0	0	0	8.705	0	0	8.705
Indonesia	901.820	235.505	157.302	1.294.627	2.083.289	24.745	16.163	2.124.197
Share (%)	69,7	18,2	12,2		98	1	1	

Sumber: Diolah dari Data Perkebunan, 1989.

Kasus yang hampir sama terjadi pula pada komoditi kopi, rempah-rempah, kelapa, kayu bulat dan lain-lain. Ekspor kopi tahun 1989 (Januari-September) mencapai US\$409,6 juta tetapi tahun berikutnya (1990) merosot menjadi US\$282,4 juta. Sebagian besar produksi kopi juga dihasilkan oleh perkebunan rakyat (94% atau 372 ribu ton), sisanya (6%) oleh perkebunan swasta dan negara.

Penurunan yang terjadi pada beberapa jenis komoditi ekspor agro-industri tersebut, dapat disebut suatu ironi. Kekayaan alam Indonesia sebenarnya menjanjikan berbagai peluang bisnis dan ekspor yang berpotensi. Tetapi hal ini dapat diraih jika di sektor pertanian dilakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan keunggulan komparatif produk. Selain itu jaringan pasar yang efektif dan efisien diciptakan.

Inovasi: Mengangkat Prestasi

Terdapat 4 faktor yang diduga sebagai penyebab utama kemerosotan ekspor agro-industri. *Pertama*, strategi pemasaran yang tidak efisien dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat keberhasilan Singapura. Tanpa lahan pertanian -- khususnya untuk kopi, rempah-rempah dan karet -- negara ini telah mampu menyaingi Indonesia dalam ekspor komoditi primer dengan mayoritas hasil pertanian. *Kedua*, konsentrasi Indonesia pada usaha swasembada beras dalam dasawarsa terakhir. Keberhasilan swasembada beras yang telah dicapai saat ini sedikit banyak mengurangi terjadinya peningkatan ekspor agro-industri. Tapi hal ini wajar karena kebutuhan hidup yang paling dasar bagi masyarakat Indonesia merupakan basis terpenting bagi perkembangan masyarakat dan pembangunan Indonesia selanjut-

nya. *Ketiga*, friksi antar organisasi atau perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Gabungan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI), para pedagang dan perusahaan lain, beberapa waktu lalu bergulat dalam hal tata niaga cengkeh. Hal yang hampir serupa terjadi juga pada beberapa organisasi yang bergerak di komoditi pertanian yang lain (misalnya minyak kelapa sawit). *Keempat*, lemahnya inovasi teknologi untuk mengembangkan agro-industri. Faktor terakhir ini merupakan faktor dasar dan terpenting untuk meningkatkan mutu hasil pertanian agar mempunyai keunggulan komparatif. Rendahnya mutu kopi, getah karet dan minyak kelapa sawit merupakan contoh konkrit dalam lingkup ini.

Inovasi teknologi untuk meningkatkan mutu produk agro-industri tampaknya memang kurang mendapatkan perhatian. Padahal inovasi teknologi jika berkaitan dengan kegiatan ekonomi bukan sekedar mencakup faktor-faktor domestik (seperti pertumbuhan nilai tambah, kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan), tetapi juga daya saing produk-produk di pasar dunia maupun pasar dalam negeri.³ Lemahnya daya saing produk agro-industri Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN disebabkan karena terkonsentrasinya dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor manufaktur. Tahun 1986/1987 dana untuk

³H.A. Khan dan E. Thorbecke, *Macroeconomic Effects and Diffusion of Alternative Technologies Within a Social Accounting Matrix Framework* (Geneva: ILO, 1988) dalam Sayuti Hasibuan, "Pengembangan Sumberdaya Manusia, Proses Industrialisasi dan Pengembangan Teknologi," *Business News* (Jakarta: PT. Business News, 1990). No. 328 tahun IV, 1c. Lebih jauh tentang arti penting inovasi teknologi lihat Sumitro Djojohadikusumo, *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1985).

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp96 milyar (2,2% dari total dana pembangunan). Tahun 1988/1989 dana yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp149 milyar (3,5% dari total dana pembangunan) dan tahun 1989/1990 sebesar 4%. Hanya sebagian kecil dari alokasi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan inovasi teknologi agro-industri.

Banyak contoh dapat diangkat untuk menunjukkan kurangnya perhatian -- dan kecilnya dana -- dalam penelitian dan pengembangan agro-industri. Inovasi teknologi dalam produksi karet misalnya, sampai saat ini boleh disebut setengah terbengkalai. Penurunan ekspor karet yang tajam dalam tahun-tahun terakhir disebabkan ketidakseimbangan pengembangan teknik penyemai-an dengan pengelolaan kebun secara baik. Usaha riset untuk menghasilkan inovasi teknologi guna menopang keandalan teknik produksi atau manajemen tampaknya sedikit sekali dilakukan baik oleh pihak swasta, pemerintah maupun rakyat yang mempunyai prosentase terbesar dalam penguasaan lahan perkebunan karet. Rendahnya kualitas karet yang dihasilkan selain karena persoalan *over tapping* sebenarnya lebih disebabkan karena tidak adanya inovasi teknologi pada lingkup produk ini. Demikian pula halnya dengan produksi kopi. Penurunan hasil ekspor komoditi kopi juga banyak dipengaruhi oleh rendahnya mutu kopi. Banyak kelemahan berkaitan dengan produk kopi; mulai dari pemanenan, pengeringan, sortasi, sampai serangan hama dan bibit. Kurangnya peran penelitian dan pengembangan telah menyebabkan mutu kopi merosot. Berbagai hal seperti penelitian untuk mengembangkan bibit unggul atau memberantas dan mengantisipasi serangan hama, sangat lambat dilakukan karena

keterbatasan dana. Persoalan yang sama terjadi pula pada komoditi coklat, vanili, tembakau dan kayu manis.

Keberadaan Balai Besar Industri Hasil Pertanian (BBIHP) di Bogor, sebenarnya dapat membantu sebagian kesulitan-kesulitan di atas. Tetapi BBIHP ini terbentur pada masalah dana operasional khususnya untuk penelitian dan pengembangan. Lembaga sepenting BBIHP ini hanya mendapatkan anggaran pembangunan sebesar Rp150 juta per tahun padahal anggaran rutin per tahun dapat mencapai Rp450 juta. Dana untuk membiayai aktivitas BBIHP ini seluruhnya ditanggung oleh Departemen Perindustrian. Dengan keterbatasan ini maka penelitian dan pengembangan yang mampu dilakukan oleh BBIHP juga sangat terbatas.

Tampaknya ada generalisasi yang berlaku pada komoditi yang tercaup dalam agro-industri, yaitu kurangnya peran riset untuk menghasilkan inovasi baru yang dapat mendukung peningkatan kualitas produk.

Persoalan inovasi teknologi pada agro-industri dalam kurun waktu mendatang akan menjadi persoalan serius jika tidak mendapatkan penanganan segera. Apalagi kebijakan industri "mulai" dikonsentrasikan pada pengolahan barang primer menjadi sekunder; dan berorientasi pada ekspor manufaktur untuk meningkatkan perolehan devisa, mempertahankan kredibilitas neraca pembayaran dan menghindari beban yang berlebihan sehubungan dengan kewajiban membayar utang luar negeri. Pada konteks kebijakan ini, apabila barang primer yang dihasilkan tidak memenuhi kualitas tertentu maka kebijakan untuk mengubah barang primer menjadi sekunder sebagai bentuk pemecahan masalah terhadap fluktuasi harga komoditi primer

ekspor menjadi kurang berarti. Hasil akhirnya hampir dapat dipastikan, bahwa hasrat untuk meningkatkan perolehan devisa, mempertahankan kredibilitas neraca pembayaran dan menghindari beban utang luar negeri yang berlebihan akan meleset dari perencanaan semula karena barang sekunder tersebut -- sama halnya dengan barang primer -- tidak mempunyai keunggulan komparatif.

Pengalaman merosotnya ekspor kopi, karet dan lain-lain, padahal tahun-tahun sebelumnya komoditi ini memberikan sumbangan yang besar pada total ekspor Indonesia, tampaknya perlu mendapatkan perhatian. Juga meningkatnya ekspor ikan dan udang dalam tahun-tahun terakhir dapat dilihat tak ubahnya seperti posisi kopi dan karet waktu sebelum merosot. Keunggulan komparatif komoditi ikan dan udang sekarang ini suatu saat akan mengalami kondisi yang sama dengan kopi atau karet jika tidak segera mendapatkan perhatian.

Persoalan dana untuk melakukan riset dan menghasilkan inovasi teknologi merupakan persoalan utama untuk mengangkat kembali prestasi agro-industri, di samping variabel lain seperti tenaga ahli dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia dalam hal mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan, Indonesia memang masih ketinggalan. Singapura tahun 1988 mengalokasikan US\$187,4 milyar untuk penelitian dan pengembangan dan Malaysia US\$110 milyar. Sedangkan Indonesia untuk tahun yang sama hanya mengalokasikan US\$75,1 milyar.⁴ Perhatian Singapura dan Malaysia pada penelitian dan pengembangan dapat dijadikan contoh bagi

Indonesia dalam rangkaian upaya peningkatan prestasi agro-industri.

Alternatif Kebijakan: Menekan Hambatan

Mengangkat kembali prestasi ekspor agro-industri Indonesia di antara negara-negara ASEAN merupakan langkah strategis yang masih laik ditempuh Indonesia di samping mengembangkan industri manufaktur. Potensi agro-industri yang ada harus ditunjang dengan kebijakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemauan politik yang kuat dari para pembuat kebijakan juga diperlukan untuk melakukan pengawasan konstruktif terhadap segala hal yang mungkin menjadi kendala inovasi teknologi pada agro-industri.

Sekurangnya ada tiga kendala serius yang harus ditekan untuk dapat mengembangkan inovasi teknologi pada agro-industri. *Pertama*, adanya "lingkaran setan" antara kurangnya kemampuan teknologi lokal dan rendahnya permintaan terhadap teknologi lokal. Lingkaran setan ini mengakibatkan terhambatnya inovasi teknologi khususnya pada agro-industri. Perusahaan-perusahaan lokal yang bergerak di agro-industri umumnya kurang yakin terhadap kemampuan teknologi lokal dan mempunyai kecenderungan mempergunakan teknologi asing. Padahal alih teknologi seperti ini tidak selalu secara langsung dapat diterapkan untuk meningkatkan agro-industri, bahkan kadang-kadang membuahkan hasil tidak seperti yang diharapkan. Karena situasi seperti ini tidak mengherankan jika penelitian dan pengembangan

⁴Lihat *Pacific Science and Technology Profile*, PECC, 1991, 5.

teknologi pribumi tidak pernah dapat mendekati masalah-masalah yang dihadapi industri lokal. Alternatif kebijakan yang mungkin ditempuh adalah pemantapan keputusan politik para pembuat kebijakan agar perusahaan lokal semakin mengembangkan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi yang berguna bagi peningkatan prestasi agro-industri.

Hambatan *kedua*, dalam pengembangan inovasi teknologi agro-industri terdapat dominasi asing terhadap industri di Indonesia yang cenderung diabadikan oleh orang-orang (kelompok elit) yang diuntungkan oleh sistem yang berjalan. Dalam keadaan tersebut pemerintah cenderung mempergunakan pengawasan ketat terhadap impor -- karenanya terlalu melindungi perusahaan lokal dengan monopoli -- sehingga tidak akan mendorong penelitian dan inovasi dalam memperbaiki produk-produk mereka. Kebijakan yang berkaitan dengan monopoli ini juga patut mendapatkan perhatian khususnya yang menyangkut pertanyaan layak tidaknya melakukan monopoli dalam putaran ekonomi sekarang ini.

Ketiga, masih sering diabaikannya hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah maupun universitas. Sebab utama munculnya keadaan ini adalah karena kurang komunikasi antara pemerintah, sektor pendidikan dan industri. Untuk dapat mengembangkan inovasi teknologi maka keadaan ini harus segera dipecahkan.

Ada dua hal yang secara makro mungkin dapat diusahakan untuk merangsang pengembangan inovasi teknologi. *Pertama*, isu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditempatkan secara khusus dalam konteks ekonomi, keuangan dan industri. Saat ini isu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi masih digolongkan dalam cakup-

an kebudayaan meskipun secara konseptual hal ini menunjukkan kebenaran.⁵ Pengertian di kalangan pembuat kebijakan tampaknya perlu disamakan khususnya pengertian yang menyangkut cara mencapai pertumbuhan ekonomi seiring dengan perubahan teknologi dan bukan sekedar pengertian teknologi dalam cakupan kebudayaan. *Kedua*, karena gagasan inovasi teknologi tercakup dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan kegiatan industri, maka implementasinya dalam pertumbuhan ekonomi harus melibatkan kerjasama yang erat antara pembuat keputusan, para pengusaha (asosiasi) dan ilmuwan (pemerintah maupun swasta).

Pemanfaatan Teknologi Remote Sensing

Selain alternatif kebijakan makro yang dapat mempengaruhi infra-struktur tersebut, ada satu jenis teknologi modern yang selayaknya diterapkan di Indonesia dalam rangkaian program mengangkat prestasi agro-industri. Jenis teknologi ini adalah teknologi penginderaan jarak jauh (*remote sensing*).⁶ Pemanfaatan teknologi ini jika dilihat sekilas memang tidak menguntungkan bahkan merupakan kebijakan yang dapat dinilai tidak "membumi dan pemborosan", tetapi jika dilihat secara lebih luas, justru gambaran sebaliknya yang didapat. Dengan pemanfaatan teknologi ini hasil produk agro-industri Indonesia akan mempunyai keunggulan komparatif seperti awal de-

⁵Lihat GBHN, 1988.

⁶Penjelasan teoritis yang lebih bersifat teknis dapat dilihat dalam Thomas M. Lillesand dan Ralph W. Kiefer, *Penginderaan Jarak Jauh dan Interpretasi Citra* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1990). Sedangkan judul asli buku ini adalah *Remote Sensing and Image Interpretation* (NY: John Wiley & Sons Inc., 1979).

kade 1980-an dan tidak tertutup kemungkinan prestasinya akan meningkat kembali sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain. Peningkatan prestasi ini tentunya akan menutup besarnya biaya untuk transfer teknologi penginderaan tersebut.

Batasan umum penginderaan jarak jauh adalah teknologi yang mempergunakan alat sensor khusus untuk menemukan dan mengukur sesuatu, misalnya panas bumi, keadaan lahan pertanian dan sebagainya. Sedangkan batasan yang diberikan Lillesand dan Kiefer tentang penginderaan jarak jauh adalah ilmu dan seni tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji.⁷

Dengan memanfaatkan sensor energi elektromagnetik yang dilakukan dari wahana udara maupun dari antariksa, teknologi penginderaan jarak jauh dapat menginventarisasi, melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap sumber daya alam. Apabila teknologi ini diterapkan dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan mutu produk agro-industri, maka segala produk yang mempunyai peluang ekspor dapat dipantau perkembangannya dari awal sehingga menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif.

Pada sektor pertanian, penerapan teknologi penginderaan jarak jauh dapat memantau tiga persoalan terpilih: klasifikasi jenis tanaman, penilaian kondisi tanaman, dan penafsiran pola tanggap spektral dan tekstur foto dari tanaman tersebut dapat diinterpretasi oleh foto udara. Tanaman yang dibudidayakan menjadi sasaran pemantauan se-

hingga selalu diketahui perkembangan dan kondisi tanaman tersebut. Perubahan karakteristik tanaman selama pertumbuhan, penyakit atau hama yang mungkin menyerang, juga kerusakan tanaman karena bencana dapat dipantau sejak awal sehingga mempermudah upaya penanggulangan. Dengan mengetahui kondisi tanaman tersebut, maka proyeksi tentang tingkat keberhasilan produksi juga dapat diperhitungkan dengan baik.

Pada sektor kehutanan, penerapan teknologi penginderaan jarak jauh dapat meliputi pengelolaan kayu, perawatan dan perbaikan tegakan hutan, pengawasan kebakaran, identifikasi species pepohonan, pengukuran hutan dan penafsiran penyakit atau serangan hama. Tetapi dalam bahasan ini hanya akan diuraikan tiga hal yaitu identifikasi species pepohonan, pengukuran hutan, dan penafsiran penyakit atau hama.

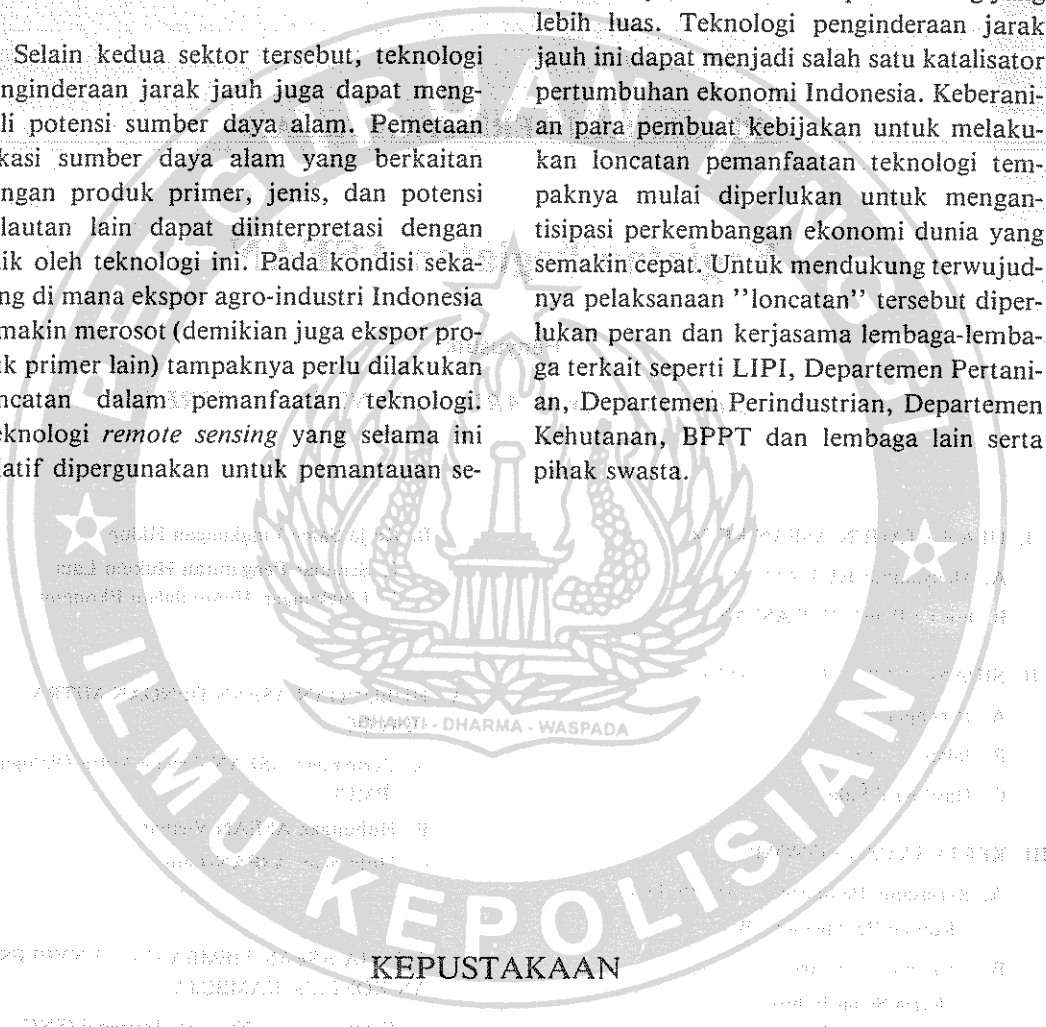
Identifikasi species pohon dapat dilakukan oleh foto udara melalui proses eliminasi dengan tahapan: (1) mengeliminasi species pohon yang tidak mungkin atau mustahil ada di daerah bersangkutan karena faktor lokasi, fisiografi atau iklim; (2) menentukan kelompok species mana yang sebenarnya terdapat di daerah tersebut; (3) mengidentifikasi setiap species pohon dengan menggunakan asas pokok interpretasi foto udara. Dalam identifikasi species pohon, dasar yang dipergunakan adalah bentuk, ukuran, bayangan, pola, rona dan tekstur. Untuk *pengukuran hutan*, tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan volume kayu yang akan ditebang di suatu daerah. Selain itu -- dengan teknik tertentu -- penginderaan jarak jauh juga dapat menginterpretasi layak-tidaknya pohon karet untuk disadap. Sedangkan untuk *penafsiran penyakit* atau *hama* seperti bakteri pohon, jamur, virus dan pelaku lain,

⁷Ibid., 1.

penginderaan jarak jauh dapat menginterpretasi jenis penyakit apa yang sedang menyerang pepohonan. Hal ini bermanfaat untuk melakukan penanggulangan awal sehingga produk dari hutan tersebut mempunyai kualitas tertentu.

Selain kedua sektor tersebut, teknologi penginderaan jarak jauh juga dapat menggalikan potensi sumber daya alam. Pemetaan lokasi sumber daya alam yang berkaitan dengan produk primer, jenis, dan potensi kelautan lain dapat diinterpretasi dengan baik oleh teknologi ini. Pada kondisi sekarang di mana ekspor agro-industri Indonesia semakin merosot (demikian juga ekspor produk primer lain) tampaknya perlu dilakukan loncatan dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi *remote sensing* yang selama ini relatif dipergunakan untuk pemantauan se-

gala hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan (pemanfaatan teknologi ini pada pemantauan sumber daya alam masih dalam lingkup terbatas yaitu pada jenis sumber alam tertentu, misalnya minyak), sudah saatnya dimanfaatkan pada bidang yang lebih luas. Teknologi penginderaan jarak jauh ini dapat menjadi salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberanian para pembuat kebijakan untuk melakukan loncatan pemanfaatan teknologi tampaknya mulai diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia yang semakin cepat. Untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan "loncatan" tersebut diperlukan peran dan kerjasama lembaga-lembaga terkait seperti LIPI, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, BPPT dan lembaga lain serta pihak swasta.



Bachtiar, Tb. H. Rifai, "Peningkatan Iptek Secara Terpadu, Terarah dan Serasi," *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Jakarta: LIPI, 1981).

Chenery, Hollis and Hoses Syzquin (eds.), *Patterns of Development, 1950-1970* (London: Oxford University Press, 1975).

Garis-garis Besar Haluan Negara, 1988.

Hasibuan, Sayuti, "Pengembangan Sumber Daya Manusia, Proses Industrialisasi dan Pengembangan Teknologi," *Business News No. 328* (Jakarta: PT Business News, 1990).

Lillesand, M. Thomas dan Ralph W. Kiefer, *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra* (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1990).

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

I. ULANG TAHUN ASEAN KE-24

- A. Menyambut HUT ASEAN
- B. Forum Panel HUT ASEAN

II. SIDANG PARA MENLU ASEAN

- A. Persiapan
- B. Jalannya Sidang
- C. Hasil-hasil Sidang

III. KERJA SAMA EKONOMI

- A. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata
 - Konsep Perdagangan Bebas
- B. Kerjasama Industri, Mineral dan Energi
 - 1. Kerja Sama Industri
 - 2. Kerja Sama Energi
- C. Kerja Sama Pangan, Pertanian dan Kehutanan
 - Sidang COFAF ke-14

IV. KERJA SAMA NON-EKONOMI

- A. Kerja Sama Kebudayaan dan Informasi
 - Pertemuan Menteri Penerangan ASEAN ke-2

B. Kerja Sama Lingkungan Hidup

- 1. Seminar Pengaturan Hukum Laut
- 2. Lingkungan Hidup dalam Ekonomi

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA

- A. Pertemuan ASEAN dengan Mitra Dialognya (PMC)
- B. Hubungan ASEAN-Vietnam
- C. Hubungan ASEAN-Laos

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

- A. Sidang Dewan Nasional Tertinggi (SNC)
- B. Pertemuan Informal Anggota Dewan Nasional Tertinggi (SNC)
- C. Sidang Dewan Nasional Tertinggi (SNC)

VII. LOKAKARYA PENGELOLAAN POTENSI LAUT CINA SELATAN

I. ULANG TAHUN ASEAN KE-24

A. MENYAMBUT HUT ASEAN

Dalam rangka menyambut HUT ASEAN ke-24, Dubes Filipina untuk Indonesia, Oscar G. Valenzuela, mengatakan bahwa: (1) EAEG bukan merupakan tantangan serius bagi kerja sama ekonomi ASEAN, tetapi bersifat pelengkap bagi kelancaran kerja sama ekonomi di kawasan itu; (2) ASEAN harus meningkatkan kerja sama ekonomi yang lebih konkret agar di masa mendatang dapat mengatasi rintangan yang menghambat kemajuan kerja samanya; (3) langkah kerja sama ekonomi ASEAN harus diprioritaskan untuk dapat memperkuat peranannya di dunia internasional; (4) masalah utama yang harus dibahas dalam KTT ASEAN ke-IV adalah mewujudkan kerangka kerja sama ekonomi ke dalam bentuk perjanjian dan penyusunan anggotanya serta pengaturan masalah keamanan regional; (5) untuk memperkecil dampak EAEG atas ASEAN diperlukan peningkatan kerja sama ekonomi yang melibatkan sektor swasta; (6) keterlibatan swasta dalam perdagangan intra ASEAN harus lebih diaktifkan lagi terutama untuk meningkatkan ekspor tradisional dan manufacturing dari negara anggota ASEAN; (7) bentuk kerja sama perdagangan seperti itu perlu dikembangkan lagi meskipun akan terjadi kompetisi harga antar produk, karena persaingan itu merupakan hal yang wajar dan tergantung pada selera konsumen; (8) kerja sama ekonomi yang konkret dapat diwujudkan jika pihak-pihak yang terkait mencari jalan untuk memasuki pangsa pasar di antara negara anggota ASEAN; (9) tingginya biaya perdagangan intra ASEAN disebabkan oleh kurangnya kapal pengangkut produk ke negara-negara anggota ASEAN; (10) keputusan AS untuk meninggalkan pangkalannya di Filipina menunjukkan adanya perubahan percaturan politik di kawasan ini; (11) sudah waktunya bagi ASEAN untuk memasuki periode menjaga keamanan dan stabilitas kawasannya sendiri, karena itu Filipina mendukung konsep ZOPFAN; (12) fungsi pangkalan AS di Filipina adalah untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya; (13) hubungan bilateral Indonesia-Filipina sejalan dengan semangat ASEAN. Hubungan politik kedua negara hampir tidak ada rintangan yang serius, meskipun masih terdapat persoalan kecil, seperti kasus penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kedua negara, tetapi dapat diselesaikan secara bersahabat. Meskipun demikian kerja sama ekonomi, terutama perdagangan belum berjalan lancar dan masih menemui banyak rintangan. Kerja sama ini masih

dapat ditingkatkan lagi karena masih banyak potensi yang dapat dikembangkan (*Angkatan Bersenjata*, 9-8-1991).

Ketua delegasi Group ASEAN di Mesir, Dubes RI untuk Mesir, Abdoeracham Djajaprawira, mengatakan kepada pers di Kairo tanggal 6 Agustus 1991 bahwa: (1) ASEAN memilih tahun 1992 sebagai tahun kunjungan ASEAN dalam rangka memperingati HUT ASEAN ke-25; (2) pada prinsipnya Tahun Kunjungan ASEAN merupakan puncak Tahun Wisata bagi negara-negara ASEAN yang telah mengadakan tahun kunjungan secara terpisah; (3) kecuali Singapura dan Muangthai, kerja sama pariwisata ASEAN selama ini kurang kompak bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan masih ketinggalan jauh dari Mesir; (4) promosi Tahun Kunjungan Wisata ASEAN yang didukung oleh berbagai program pariwisata merupakan langkah awal untuk memperkenalkan ASEAN guna menarik masyarakat turis Mesir; (5) ASEAN telah memperbaiki sarana-sarana penunjang pariwisata, seperti hotel, transportasi dan agenda acara dengan keragaman budaya ASEAN; (6) media massa Mesir sangat jarang memuat berita tentang peristiwa yang terjadi di ASEAN dan jika ada kolomnya sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh: (a) kecilnya kepentingan atas perkembangan politik dan kebudayaan ASEAN; (b) budaya dan tradisi masyarakat ASEAN kurang dikenal; (c) kurangnya penerbangan dari ASEAN ke Mesir dan sebaliknya; (7) maskapai penerbangan di ASEAN agar mengadakan penerbangan secara teratur ke Mesir dan mengajak biro-biro perjalanan Mesir untuk bekerja sama menggalakkan pariwisata kedua pihak; (8) kurangnya wisatawan Mesir berkunjung ke negara anggota ASEAN karena jaraknya yang relatif jauh dan biayanya mahal, sebaliknya wisatawan dari ASEAN hanya sedikit yang memilih Mesir sebagai obyek kunjungannya (*Pelita*, 3-8-1991).

B. FORUM PANEL HUT ASEAN

Forum Panel untuk memperingati HUT ASEAN ke-24 yang bertema "Prospek Kerja Sama ASEAN: Antisipasi Terhadap Perkembangan Masa Depan" berlangsung di Jakarta tanggal 7 Agustus 1991, dengan menghadirkan para panelis: Kepala Biro Setnas ASEAN Aswin Darwis MA, Hasnan Habib, Prof. Dr. Sutarn Takdir Ahsyanbana dan Marzuki Darusman.

Hasnan Habib mengatakan pada forum itu bahwa: (1) prakarsa-prakarsa politik ASEAN, khususnya untuk menyelesaikan masalah Kamboja, telah membuat

ASEAN sebagai organisasi regional yang paling berhasil di Dunia Ketiga, terutama dalam kerja sama politik dan diplomasi; (2) krisis Kamboja selain merupakan ancaman utama atas stabilitas ASEAN, juga merupakan pendorong berkurangnya kekompakan dan solidaritas ASEAN; (3) tanpa faktor perekat baru, masalah intra ASEAN yang belum terselesaikan, seperti sengketa teritorial, ZEE, pendatang haram, pangkalan militer serta gerakan separatis, akan muncul kembali ke permukaan dan dapat mengancam keutuhan ASEAN; (4) sikap beberapa negara anggota ASEAN yang masih berpandangan bahwa perlu kehadiran pihak asing untuk melindungi keamanan kawasan perlu direvisi; (5) kerja sama ekonomi yang merupakan salah satu tujuan utama ASEAN yang diharapkan dapat menjadi perekat baru, berjalan sangat lambat dan hampir tidak berarti sama sekali; (6) kemajuan ekonomi negara-negara ASEAN dalam beberapa tahun terakhir ini bukan karena hasil kerja sama yang direncanakan ASEAN tetapi lebih disebabkan oleh strategi ekonomi masing-masing negara; (7) negara-negara ASEAN menganut sistem ekonomi yang berorientasi pasar dan mulai mengalihkan strategi yang *inward looking* ke *outward looking*. Strategi itu telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mengesankan dan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang paling dinamis (*Pelita*, 8-8-1991); (8) dua faktor yang mempermudah pelaksanaan konsep ZOPFAN saat ini adalah; (a) mulai terjalinnya hubungan kerja sama antara Uni Soviet dan AS untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia; (b) semakin terjalinnya ikatan-ikatan persahabatan antara negara-negara besar dan menengah di kawasan Asia Pasifik. Kondisi ini dapat dimanfaatkan ASEAN untuk menggalang kerja sama dan meningkatkan perannya untuk memelihara keamanan dan perdamaian kawasan; (9) pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara khususnya dan Asia Pasifik umumnya memerlukan kemauan politik dan komitmen penuh dari para pemimpin ASEAN untuk membentuk suatu kerja sama yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi; (10) agar dapat memberikan sumbangan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan Asia Pasifik, ASEAN perlu: (a) meningkatkan saling kepercayaan melalui kerja sama keamanan multilateral; (b) meningkatkan saling kepercayaan dengan negara-negara Indocina serta Myanmar dengan mengikutsertakan mereka dalam pertemuan-pertemuan ASEAN sebagai peninjau lebih dulu. Selain itu juga harus diusahakan agar mereka ikut menjadi penandatangan dari *Treaty of Amity and Cooperation*; (c) menggiatkan pengkajian-pengkajian bersama mengenai ketahanan nasional dan

regional dengan sasaran konsep program pembangunan ketahanan regional yang komprehensif (*Kompas*, 8-8-1991).

Kepala Biro Ekonomi Setnas ASEAN Aswin Darwis MA mengatakan bahwa: (1) salah satu agenda terpenting dalam KTT ASEAN di Singapura adalah rencana liberalisasi perdagangan ASEAN atau *ASEAN Free Trade* yang konsep programnya sedang dibahas oleh kelompok kerja khusus dan akan selesai pada bulan November 1991; (2) ASEAN harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang baru yang timbul akibat perkembangan perekonomian dunia saat ini, seperti rencana Pasar Tunggal Eropa (PTE), Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Kanada dan demokratisasi ekonomi di Eropa Timur; (3) kekuatan ASEAN untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang baru akan ditentukan oleh kondisi perekonomian masing-masing negara; (4) meskipun kemampuan individual ASEAN baik, tetapi kerja sama intra ASEAN belum memuaskan; (5) liberalisasi perdagangan merupakan salah satu terobosan baru yang lebih berani dan inovatif untuk mengatasi kelambanan kerja sama ekonomi ASEAN; (6) akhir-akhir ini ASEAN semakin terbuka dan berani keluar dari kelambanan pola kerja sama; (7) KTT ASEAN IV diharapkan menghasilkan keputusan politis penting di bidang ekonomi yang menetapkan kerja sama ekonomi yang jelas dan konkrit (*Kompas*, 8-8-1991).

Anggota Komisi I DPR RI, Marzuki Darusman mengatakan bahwa: (1) peranan organisasi pemuda jangan terpisah dari perkembangan ASEAN secara keseluruhan; (2) interaksi organisasi pemuda ASEAN di satu sisi akan meningkatkan persatuan dan mengembangkan wawasan untuk menghadapi tantangan-tantangan ekstern, di sisi lain dapat membentuk suatu subkultur baru untuk mengembangkan interaksi intelektual generasi muda (*Kompas*, 8-8-1991); (3) perlu ditumbuhkan identitas ASEAN yang lebih kental pada generasi muda di masing-masing negara anggotanya; (4) hari pemuda ASEAN perlu ditetapkan sebagai perintah untuk membangun pranata dan institusi ASEAN di kalangan generasi muda; (5) pertemuan pemuda ASEAN belum secara serius ditujukan untuk membangun identitas ASEAN; (6) peranan kerja sama ekonomi dan kebudayaan ASEAN dapat memberikan kerangka dasar ke arah perkembangan ASEAN; (7) konsensus ASEAN untuk memberi tempat utama bagi sektor swasta sebagai mesin penggerak ekonomi memiliki implikasi

terhadap interaksi sistem politik ASEAN (*Pelita*, 8-8-1991).

Prof. Dr. Sunan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa: (1) perubahan budaya ASEAN perlu dipercepat agar warga negaranya cepat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan arus globalisasi (*Kompas*, 8-8-1991); (2) Asia Tenggara merupakan satu-satunya kawasan yang dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan besar dunia, seperti Cina, India, Timur Tengah dan Eropa; (3) generasi muda ASEAN ditantang untuk memelopori mensitesikan semua unsur budaya dunia secara kreatif agar menghasilkan budaya baru yang unggul (*Pelita*, 8-8-1991).

II. SIDANG PARA MENLU ASEAN

A. PERSIAPAN

Wakil Menlu Malaysia, Abdullah Fadzil Che Wan, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 14 Juni 1991 bahwa: (1) Malaysia dengan persetujuan negara anggota ASEAN lainnya mengundang Uni Soviet dan RRC untuk menghadiri sidang para Menlu ASEAN (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur; (2) Malaysia sebagai tuan rumah AMM yang akan berlangsung tanggal 19-20 Juli 1991 telah menyampaikan undangan kepada Menlu Uni Soviet, Alexander Bessmertnykh, dan Menlu RRC, Qian Qi Chen; (3) Uni Soviet akan mengutus Wakil Perdana Menteri Yuri Maslyukov dan RRC mengirim Menlu Qian Qi Chen untuk menghadiri pertemuan tersebut; (4) dialog ASEAN dengan mitra-mitranya akan berlangsung pada pasca pertemuan para Menlu ASEAN tanggal 22-24 Juli 1991; (5) Korea Selatan akan menjadi mitra dialog ASEAN yang ketujuh atau yang terbaru; (6) AMM ke-24 ini mempunyai arti penting karena berlangsung seusa Perang Teluk dan berakhirnya Perang Dingin antara Timur dan Barat; (7) di sela-sela pertemuan formal juga akan terjadi pembicaraan bilateral antara semua negara yang hadir secara informal; (8) Malaysia akan mengadakan pembicaraan dengan Uni Soviet dan RRC secara terpisah sebelum berlangsung dialog antara para Menlu ASEAN dan mitra-mitranya (*Antara*, 13-7-1991).

Seusai membuka seminar tentang Peranan Pelayanan Konsultasi dalam Perekonomian Nasional Malaysia, Deputi Menlu Malaysia, Abdullah Fadzil Che Wan, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 14 Juli 1991 bahwa: (1) ASEAN akan melakukan pertemuan terpisah dengan Uni Soviet dan RRC

mengenai peninjauan hubungan ekonomi di masa mendatang; (2) kedua negara itu akan diberi status sebagai tamu dan tidak akan mengikuti jalan sidang AMM serta PMC baik sebagai peninjau maupun mitra dialog; (3) masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ASEAN bermaksud memasukkan kedua negara tersebut sebagai mitra dialog (*Antara*, 14-7-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 Juli 1991 bahwa: (1) KTT ASEAN IV selain merupakan kesepakatan Manila, penyelenggaraannya juga dirasakan sudah sangat mendesak; (2) kehadiran Menlu RRC, Qian Qi Chen dan Wakil PM Uni Soviet, Yuri Maslyukov belum merupakan dialog tetapi baru merupakan pembicaraan pendahuluan; (3) ASEAN harus menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam dunia saat ini; (4) ASEAN perlu meninjau pelaksanaan keputusan Manila yang telah dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekonomi antar anggotanya; (5) Indonesia akan meninjau kemajuan yang telah dicapai dalam Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC); (6) sejak pertemuan AMM di Jakarta telah dicapai berbagai keputusan untuk memperkuat mekanisme dan struktur ASEAN, khususnya untuk memperkuat peranan Sekjen dan Sekretariat Pusat ASEAN; (7) Indonesia dan Malaysia akan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) mengenai pembentukan komisi bersama tingkat menteri untuk menangani masalah pulau Sipadan dan Ligitan. Komisi ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi kedua belah pihak secara memuaskan atas dasar persahabatan dan keakraban sebagai negara tetangga dekat; (8) Presiden Soeharto telah memberi petunjuk secara khusus mengenai berbagai aspek dan merestui pembentukan komisi bersama Indonesia-Malaysia (*Pelita*, 17-7-1991); (9) para Menlu ASEAN akan mendiskusikan gagasan pembentukan Kelompok Ekonomi Asia Timur (EAEG) yang disusulkan oleh PM Mahathir Mohammad; (10) AMM tidak akan mengambil keputusan tentang EAEG karena hasil-hasil diskusi akan dimasukkan dalam agenda KTT ASEAN IV di Singapura, Januari 1992; (11) isu-isu yang akan dibahas dalam AMM dan PMC adalah keamanan regional, situasi ekonomi dan politik internasional, penyelesaian konflik Kamboja, situasi pasca Perang Teluk dan perkembangan di kawasan Asia Pasifik serta putaran Uruguay (*Antara*, 19-7-1991).

Menlu RRC, Qian Qi Chen, mengatakan kepada pers di Bandara Kuala Lumpur tanggal 17 Juli 1991 bahwa: (1) RRC menganggap kehadirannya sebagai tamu pada AMM di Kuala Lumpur merupakan suatu

awal yang baik untuk mempererat hubungan dengan ASEAN; (2) negaranya bersedia memperluas hubungan kerja sama dengan ASEAN; (3) ASEAN memainkan peranan penting dalam perdamaian dan stabilitas regional; (4) hubungan bilateral Indonesia-Malaysia telah berkembang pesat sejak terjalannya hubungan diplomatik kedua negara, terutama dengan kunjungan para pemimpin kedua negara pada tahun 1990 (*Antara*, 19-7-1991).

Wakil Menlu Uni Soviet, Igor Rogachev mengatakan bahwa: (1) undangan kepada Uni Soviet untuk menghadiri AMM sangat tinggi nilainya dan merupakan langkah awal menuju terwujudnya dialog aktif yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; (2) di masa lalu negaranya pernah memandang ASEAN sebagai organisasi politik dan militer, karena pikiran-pikiran usang ideologi menumpuk selama bertahun-tahun; (3) perubahan di Uni Soviet dewasa ini, termasuk politik luar negerinya telah memungkinkan negaranya berpandangan yang lebih realistis; (4) ASEAN merupakan organisasi regional yang penuh gairah yang mengutamakan kemajuan teknologi, sosial dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggotanya; (5) kesempatan ini sangat bermanfaat bagi Uni Soviet untuk mempererat hubungan kerja sama dengan negara-negara ASEAN memecahkan masalah-masalah ekonomi dan politik yang sangat mendasak, serta memperkuat perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Pasifik (*Merdeka*, 18-7-1991).

Pada saat yang sama anggota Delegasi Uni Soviet, Vitaly Churkin, mengatakan bahwa: (1) dialog Uni Soviet-ASEAN merupakan tonggak penting dalam hubungan kedua belah pihak; (2) dialog itu merupakan konsekuensi logis dari kerja sama Uni Soviet dengan masing-masing negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang; (3) dialog diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi keamanan, stabilitas dan kerja sama di Asia Tenggara pada khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya; (4) Uni Soviet dan Malaysia selain akan bertukar pandangan mengenai masalah hubungan bilateral, khususnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan, mereka juga membicarakan masalah-masalah regional dan internasional yang mendasak (*Merdeka*, 18-7-1991).

Sesampainya di Kuala Lumpur tanggal 18 Juli 1991, Wakil Menlu Uni Soviet, Yuri Maslyukov mengatakan kepada pers bahwa: (1) Uni Soviet ingin mempertahankan kontak-kontak yang lebih dekat dengan ASEAN agar hubungan perdagangan, ekonomi dan

politik berkembang lebih cepat dari sebelumnya; (2) pembicaraan dengan ASEAN akan dapat mengarah pada suatu dialog tetap dengan organisasi regional ini; (3) delegasi Uni Soviet akan mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan perdagangan terkemuka di Malaysia untuk menajagi kemungkinan dan prospek mengembangkan kerja sama; (4) kemampuan untuk saling bekerja sama antara Uni Soviet dan Malaysia belum digarap sepenuhnya; (5) Uni Soviet bertujuan untuk membangun kontak dengan tokoh-tokoh pemerintah dan perusahaan komersial terkemuka guna menajagi kerja sama ekonomi lebih lanjut (*Pelita*, 19-7-1991).

Siaran pers Kementerian Luar Negeri Muangthai tanggal 17 Juli 1991 mengatakan bahwa: (1) ASEAN akan mengesahkan resolusi pembentukan zona perdagangan bebas di Asia Tenggara; (2) AMM ke-24 di Kuala Lumpur akan membahas masalah tarif dan perdagangan yang telah tertunda selama sepuluh tahun (*Antara*, 18-7-1991).

Dirjen Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN Agus Tarmidzi, mengatakan kepada Pelita di Jakarta tanggal 20 Juli 1991 bahwa: (1) untuk mengantisipasi berbagai perubahan di dunia dan peningkatan kerja sama regional wewenang serta peran Sekjen dan Sekretariat ASEAN akan ditingkatkan. Demikian pula penentuan staf Sekretariat ASEAN tidak lagi berdasarkan jatah tiap negara, tetapi berdasarkan profesionalisme; (2) berbagai usulan mengenai perubahan dan peningkatan peran Sekjen dan Setnas ASEAN yang sudah diidentifikasi akan disetujui oleh para Menlu ASEAN; (3) dengan perubahan itu Sekjen ASEAN berperan untuk menyelenggarakan, mempersiapkan dan memimpin sebuah pertemuan ASEAN; (4) agar Sekretariat benar-benar berfungsi, maka berbagai pertemuan yang penyelenggaraannya selama ini selalu berpindah tempat akan ditetapkan pelaksanaannya di Sekretariat ASEAN Jakarta. Pertemuan standing committee tidak akan diketuai oleh Dirjen Setnas ASEAN tetapi akan dipimpin oleh Sekjen dan pertemuannya tidak dilakukan di negara yang mendapat giliran melainkan di Sekretariat ASEAN; (5) dalam pertemuan khusus masih akan dilakukan di luar Sekretariat terutama untuk pertemuan yang dipimpin oleh seorang menteri; (6) meskipun wewenang Sekjen ASEAN telah ditingkatkan perannya tetapi belum dapat disamakan dengan Sekjen PBB; (7) kehadiran RRC dan Uni Soviet dalam AMM berbeda dengan kehadiran PNG yang merupakan pengamat tetap; (8) Korea Selatan yang sejak tahun 1990 telah menjadi mitra wicara sektoral akan dikukuhkan men-

jadi mitra wicara penuh; (9) sejumlah negara di Eropa, Timur Tengah dan Amerika Latin yang telah mengajukan diri menjadi mitra wicara ASEAN masih akan dibahas oleh para pejabat senior; dan para Menlu ASEAN; (10) usul EAEG oleh Malaysia tidak akan dibahas dalam AMM di Kuala Lumpur karena telah diputuskan untuk dibahas oleh kelompok kerja SOM (*Pelita*, 20-7-1991).

B. JALANNYA SIDANG

Pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-24 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 19-20 Juli 1991 untuk membahas: (1) persiapan landasan bagi KTT ASEAN IV di Singapura; (2) upaya memperkokoh peranan Sekretariat ASEAN; (3) kerja sama proyek-proyek ASEAN; (4) penetapan Korea Selatan sebagai mitranya dialog ketujuh; (5) persiapan agenda dialog dengan para mitranya; (6) masa depan ASEAN untuk menghadapi perubahan blok politik dan ekonomi dunia; (7) keamanan regional dan sengketa sejumlah pulau di Laut Cina Selatan; (8) penyelesaian konflik di Kamboja dan masalah pangkalan militer di Filipina (*Antara*, 18-7-1991).

Menjelang pembukaan AMM, para Menlu ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama mengenai Kamboja antara lain: (1) ASEAN menyambut positif undangan Dewan Tertinggi Nasional (SNC) Kamboja untuk mengakreditasikan perwakilan pada SNC; (2) pada tahap sekarang ini semua upaya yang dibuat untuk menjamin momentum bagi proses perdamaian di Kamboja perlu dipelihara; (3) SNC yang kini telah berfungsi perlu diperhatikan dan diperluas dukungan internasionalnya; (4) ASEAN telah meninjau kembali situasi di Kamboja dan mencatat adanya berbagai perkembangan penting yang terjadi sejak pertemuan SNC di Jakarta tanggal 2-4 Juni 1991; (5) pertemuan SNC di Pattaya Muangthai, tanggal 24-26 Juni 1991 telah menghasilkan suatu momentum untuk memajukan proses perdamaian menuju penyelesaian politik menyeluruh; (6) ASEAN berbesar hati dan menyambut baik pertemuan informal SNC di Beijing tanggal 17 Juli 1991 yang terutama berhasil memilih Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Ketua SNC dengan suara bulat berdasarkan semangat kompromi dan rekonsiliasi nasional; (7) keputusan SNC untuk mendirikan markas besarnya di Phnom Penh memungkinkan SNC untuk melaksanakan fungsinya; (8) ASEAN mendukung usaha-usaha ketua bersama Konferensi Paris tentang Kamboja (PCC), dan kelima anggota tetap DK PBB serta Sekjen PBB, untuk terus membantu kelompok-kelompok di Kamboja mencapai

persetujuan; (9) ASEAN mengharapkan agar ketua bersama Indonesia dan Perancis menyelenggarakan pertemuan PCC kembali secepat mungkin; (10) ASEAN menyerukan perlunya rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok Kamboja untuk mengintensifkan usaha-usaha mencari kompromi di antara mereka guna menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan setelah konsultasi antara ketua bersama PCC dan anggota SNC di Jakarta tanggal 2-4 Juli 1991; (11) ASEAN menyambut baik keputusan SNC untuk mengirim delegasi yang dipimpin Sihanouk ke Sidang Umum PBB ke-46 dan mengharapkan SNC dapat menempati kursi Kamboja di PBB (*Antara*, 19-7-1991).

PM Malaysia, Mahathir Mohammad mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN menolak upaya negara-negara Barat untuk mengkaitkan isu hak asasi manusia dengan perdagangan, investasi dan keuangan, karena hal itu merupakan cara Barat untuk meningkatkan proteksionisme mereka saja; (2) demokrasi dan hak asasi manusia merupakan landasan bagi keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial, karena itu ASEAN tidak mempertentangkan demokrasi bagi rakyat dan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya; (3) ASEAN tidak sependapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya definisi atau sebuah sistem politik yang demokratis dianggap baik bila memenuhi sejumlah ukuran tertentu; (4) norma dan persepsi hak asasi manusia masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya berbeda dan juga dari satu periode ke periode lainnya; (5) pengalaman ASEAN, baik di tingkat nasional maupun regional, menunjukkan bahwa keamanan, perdamaian, demokrasi dan kebebasan serta stabilitas hanya dapat tercapai bila rakyat terbebas dari kesulitan ekonomi; (6) ASEAN memprioritaskan stabilitas politik dengan memelihara hak-hak individu dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ASEAN dapat memajukan kehidupan sosial ekonomi rakyatnya (*Antara*, 20-7-1991); (7) kerja sama politik ASEAN mempunyai pengaruh politik di dunia internasional, tetapi kerja sama ekonomi internal dan eksternal ASEAN masih perlu ditingkatkan; (8) meskipun telah ada ASEAN *Preferential Trade Agreement* (PTA), volume perdagangan intra ASEAN saat ini masih di bawah 20% dari total volume perdagangannya; (9) ASEAN harus meliberalisasikan perdagangan intra regionalnya dan membentuk wilayah perdagangan bebas ASEAN pada akhir abad ini; (10) untuk mengintegrasikan ekonomi ASEAN masih terhambat oleh persaingan dan lemahnya kerja sama industri di

samping hambatan lainnya; (11) pembentukan kelompok ekonomi Asia Timur atau *East Asia Economic Grouping* (EAEG) diperlukan untuk memperluas kelompok ekonomi Asia Tenggara; (12) EAEG bukan merupakan suatu blok ekonomi yang baru melainkan merupakan suatu forum konsultasi negara-negara Asia Timur untuk menghadapi perdagangan dunia; (13) EAEG akan memberikan landasan bagi negara-negara Asia Timur untuk bertindak dan berbicara dengan satu suara guna menghadapi setiap permasalahan perdagangan yang berdampak langsung maupun tidak langsung (*Suara Pembaruan*, 19-7-1991); (14) EAEG dapat terbentuk jika ASEAN bersatu dan kuat, baik secara politik maupun ekonomi; (15) ASEAN agar bekerja sama dengan Uni Soviet dan RRC dan menyingkirkan kendala-kendala dalam hubungan antara kelompok ASEAN dan kedua negara itu demi keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara (*Pelita*, 20-7-1991).

Menlu RI, Ali Alatas mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) jika penyelesaian menyeluruh atas konflik Kamboja yang telah berlangsung lebih dari 12 tahun semakin lebih dekat dari dugaan semula bukan merupakan suatu hal yang dilebih-lebihkan, karena SNC telah berfungsi penuh dan memberikan sumbu yang besar pada proses perdamaian di Asia Tenggara; (2) tiga perempat jalan menuju penyelesaian menyeluruh di Kamboja telah ditempuh dan kini hanya tinggal seperempat jalan yang masih tersisa yang penuh dengan hambatan dan hal-hal yang sensitif; (3) sejak pertemuan Jakarta, Pangeran Norodom Sihanouk telah memimpin SNC yang kemudian menyelenggarakan sidang lanjutan di Pattaya 24-26 Juni 1991, dan di Beijing tanggal 16-17 Juli 1991; (4) sidang SNC berikutnya hendaknya dapat lebih terfokus pada isu-isu mendasar seperti peran PBB dan hubungannya dengan SNC, demobilisasi angkatan bersenjata pihak-pihak yang bertikai dan langkah-langkah nyata untuk mencegah berulangnya praktek pembantaian massal; (5) kerja sama ASEAN dengan mitra dagangnya yang menyangkut kualitas dan jangkauan hubungan kerja sama di bidang akses pasar produk-produk ASEAN, kerja sama industri dan teknologi serta perdagangan umum seharusnya dapat lebih ditingkatkan; (6) ASEAN merasakan adanya kecenderungan umum di negara-negara industri untuk mengkaitkan isu hak asasi manusia dengan lingkungan hidup dalam konteks kerja sama pembangunan; (7) secara institusional ASEAN harus terus meningkatkan kegiatannya secara efisien, baik ke dalam maupun ke luar (*Antara*, 19-7-1991); (8) ASEAN harus dapat memberikan tanggapan kreatif

dan melakukan penyesuaian dinamis untuk menghadapi tantangan ketidakpastian dunia, baik secara politik maupun ekonomi dalam dekade 1990-an; (9) perubahan watak hubungan antar negara, khususnya antar negara besar, akan menghadapkan ASEAN pada suasana strategi global baru, yang cepat atau lambat akan berpengaruh di bidang politik, ekonomi dan konfigurasi keamanan di kawasan Asia Pasifik; (10) proses dan institusi akomodasi dan integrasi yang terjadi di Eropa dan seberang Atlantik tidak dapat dicangkokkan ke Asia Pasifik, karena terdapat perbedaan kondisi secara mendasar; (11) Indonesia berpandangan bahwa untuk meletakkan landasan bagi hubungan yang lebih damai dan stabil, secara realistis tidak dapat dilakukan dengan pembentukan kembali proses kerja sama keamanan Eropa (CSCE) di kawasan Asia Pasifik atau dengan seruan prematur bagi pembentukan kerangka keamanan Asia; (12) untuk meletakkan landasan hubungan yang stabil dan damai di kawasan Asia Pasifik perlu: (a) mempercepat penyelesaian konflik yang ada seperti menghentikan ketegangan di Kamboja dan, Jajirah Korea serta mencegah konflik di kawasan Laut Cina Selatan; (b) menjamin kelangsungan hubungan baik antara negara kawasan, antara negara besar, dan antara kelompok negara-negara tersebut; (c) memulai langkah-langkah selektif untuk membangun kepercayaan, termasuk memperbesar transparansi dalam pengaturan keamanan dan perluasan multilateral dari sejumlah persetujuan bilateral yang sudah ada; (13) pendekatan ASEAN melalui konsep ZOPFAN tetap valid dan relevan untuk menghadapi perubahan dunia; (14) realisasi konsep ZOPFAN dalam semangat transformasi yang cepat dari situasi global dan regional saat ini semakin mendesak; (15) sekarang ASEAN dituntut untuk menilai secara kritis kemajuan dan kekurangan dalam kerja sama intra ASEAN, serta mencari arah baru dan modalitas alternatif untuk intensifikasi dan akselerasi lebih lanjut; (16) upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi intra ASEAN, khususnya di bidang perdagangan dan industri, selama 24 tahun ini ternyata masih jauh di bawah harapan bersama; (17) Indonesia menyambut baik langkah inovatif yang diambil oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-22 di Bali tahun 1990; (18) Indonesia secara khusus menerima usul pelaksanaan tarif preferensi efektif bersama atau *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) atas produk-produk industri terpilih sebagai kerangka baru untuk mendorong arus barang secara lebih bebas di antara negara anggota ASEAN, sehingga mendorong peningkatan perdagangan dan investasi intra ASEAN (*Suara Karya*, 20-7-1991); (19) kelompok ker-

ja ASEAN untuk membahas gagasan EAEG Malaysia telah melakukan pertemuan pertamanya guna merinci lebih jauh berbagai aspek gagasan itu. Delegasi Indonesia dalam pertemuan sekarang ini bersedia memberikan sumbangan konstruktif untuk membahas kesimpulan pertemuan pertama; (20) Indonesia menyambut baik hasil kerja Panel Lima Tokoh Terkemuka yang dipimpin oleh Tan Sri Ghazalie Shafie untuk memperkuat struktur dan mekanisme Sekretariat ASEAN (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Menlu Malaysia, Datuk Abdullah bin Ahmad Badawi, mengatakan bahwa: (1) sejauh ini ASEAN tetap menganggap konsep ZOPFAN dan Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara tetap valid dan relevan; (2) perjanjian Hidup Berdampingan dan Kerja Sama di Asia Tenggara harus menjadi dasar untuk memperluas kerangka kerja sama perdamaian dan keamanan serta membentuk prinsip-prinsip pengaturan hubungan di antara negara-negara Asia Tenggara; (3) ASEAN perlu menghadapi proteksionisme dan hambatan perdagangan bebas ASEAN (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Sedangkan Menlu Filipina, Raul Manglapus mengatakan bahwa: (1) ASEAN hendaknya mendukung perjanjian baru Manila-Washington tentang pangkalan AS di negaranya; (2) jika ASEAN memberitahu fasilitas itu diperlukan maka pangkalan tersebut akan tetap dipertahankan; (3) pemerintahnya mungkin akan dituduh kurang berjiwa nasionalis karena menandatangani perjanjian itu; (4) Filipina telah memperjelas posisinya dan tidak mempersoalkan fasilitas militer AS di Singapura (*Merdeka*, 20-7-1991); (5) kehadiran fasilitas militer AS di Asia Tenggara masih diperlukan; (6) ASEAN hendaknya meninggalkan sikap ambivalen atas kehadiran pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara; (7) ASEAN hendaknya bersedia membuka konsensus yang tidak boleh menghindari masalah kehadiran pangkalan militer asing mengenai keamanan di Asia Tenggara dan tetap dalam kerangka ZOPFAN; (8) ASEAN harus menanggapi usulan EAEG Malaysia secara serius, karena perundingan GATT yang digalakan lagi itu kemungkinan gagal tetap ada; (9) sejauh EAEG tidak tumpang tindih dengan APEC dan ASEAN menjadi pusatnya maka sangat penting untuk melakukan pengkajian lebih jauh tentang konsep itu (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Menlu Muangthai, Arsa Sarasin mengatakan bahwa: (1) negaranya menyambut baik perkembangan di Kamboja serta perubahan kebijaksanaan di Vietnam dan Myanmar karena dapat membawa mereka untuk berperan lebih aktif di kawasan ini; (2) KTT ASEAN di

Singapura tahun 1992 hendaknya dapat menghasilkan rencana aksi yang konkret dan mencerminkan kemandirian, kesiapan dan kejelasan arah ASEAN; (3) realisasi gagasan kawasan perdagangan bebas ASEAN hendaknya bukan merupakan retorika semata (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Menlu Singapura, Won Kan Seng, mengatakan bahwa: (1) untuk meningkatkan kerja sama ekonomi ASEAN, usulan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi oleh Filipina, CEPT oleh Indonesia dan kawasan perdagangan bebas oleh Muangthai harus dipelajari dengan serius dan tidak hanya menjadi lambang dan retorika; (2) proyek segitiga pertumbuhan Singapura-Johor-Batam merupakan contoh kawasan perdagangan bebas dan proyek semacam ini dapat dikembangkan di kawasan lain; (3) usulan-usulan yang telah masuk hendaknya dibicarakan dalam KTT ASEAN yang akan datang (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Menlu Brunei Darussalam, Pangeran Muhammed Bolkuah, mengatakan bahwa: (1) pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN merupakan upaya untuk terus menumbuhkan ekonomi ASEAN; (2) EAEG mungkin akan mampu memberikan tawaran baru dan kesempatan yang lebih banyak bagi ASEAN; (3) Brunei sedang menajagi keuntungan potensial yang dapat diraih dalam perdagangan yang melibatkan banyak pihak; (4) langkah perubahan Sekretariat ASEAN merupakan jawaban untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tata dunia agar ASEAN tetap efektif dan relevan (*Kompas*, 20-7-1991).

C. HASIL-HASIL SIDANG

Komunike bersama AMM tanggal 20 Juli 1991 mengatakan antara lain: (1) perubahan hubungan strategis dan munculnya blok-blok persekutuan ekonomi memiliki implikasi terhadap Asia Tenggara dan harus dijawab secara kreatif dan dinamis; (2) ASEAN menyadari dirinya telah tumbuh sebagai organisasi regional yang dinamis, kenyal dan mempunyai daya tahan untuk menghadapi peningkatan tantangan ekonomi dan politik dekade 1990-an; (3) ASEAN harus meningkatkan kerja sama regional dengan memperkuat mekanismenya dan mempromosikan kerja sama dalam sistem perdagangan multilateral yang terbuka; (4) ASEAN harus memperluas dan meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara Asia Tenggara dan dengan negara-negara di luar kawasan; (5) ASEAN sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang akan mempelajari arah dan bentuk hubungan an-

tara ASEAN dengan negara-negara di luar ASEAN; (6) ASEAN mengukuhkan pembentukan kerja sama ASEAN dengan memperkuat Sekretariat ASEAN berdasarkan rekomendasi Panel Lima Tokoh Ternama yang mempelajari kelemahan dan kekuatan Sekretariat ASEAN. Untuk itu dibentuk sebuah kelompok kerja yang dipimpin oleh Dirjen Politik Brunei, Datuk Lim Jock Feng, untuk mempelajari arah rekomendasi Panel Lima dan bentuk hubungan yang diharapkan di masa mendatang; (7) ASEAN mempertimbangkan kesimpulan hasil pertemuan pertama Kelompok Kerja EAEG di Kuala Lumpur tanggal 4-5 Juli 1991 yang telah mencapai kemajuan. Kelompok Kerja EAEG agar mengadakan pertemuan di Singapura untuk mengkaji lebih jauh mengenai masalah tersebut yang hasilnya akan disampaikan pada para Menlu dan para Menteri Ekonomi ASEAN yang akan bertemu di Kuala Lumpur tanggal 7-8 Oktober 1991; (8) ASEAN sepakat meningkatkan status Korea Selatan sebagai mitra dialog penuh dan untuk pertama kali mengizinkan Seoul mengikuti *Post Ministerial Conference* (PMC); (9) ASEAN sepakat untuk memperkuat diri agar mampu dan tetap relevan menghadapi tantangan di masa mendatang; (10) ASEAN menyadari perlunya mulai bergerak ke arah masalah perdagangan bebas di abad mendatang; (11) konsep ZOPFAN, *Treaty of Amity and Cooperation South East Asia* dan proses dialog dalam PMC merupakan dasar untuk mencapai perdamaian dan keamanan regional dalam dekade 1990-an; (12) dialog antar negara-negara anggota ASEAN dan komitmen menyelesaikan semua perselisihan antar anggota secara damai sangat penting; (13) hubungan dengan mitra dialog telah berkembang dari sebagai negara penerima donor menjadi hubungan yang lebih seimbang; (14) ASEAN menganggap, kecenderungan sejumlah negara mitra dialog untuk mengkaitkan masalah perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia dengan kerja sama pembangunan dan komersial merupakan proteksionisme bentuk baru; (15) hak asasi di ASEAN tidak dapat disamakan dengan di Eropa dan negara-negara Barat lainnya; (16) dialog ASEAN-ME di Luksemburg sebaiknya dilanjutkan agar tercapai saling pengertian terutama dalam hak asasi manusia (*Kompas*, 22-7-1991); (17) ASEAN prihatin terhadap masalah pengungsi Indocina. Meskipun telah ada penyelesaian secara menyeluruh mengenai masalah itu tetapi jumlah pengungsi Vietnam di negara penampung sementara saat ini masih sama besarnya dengan jumlah di tahun 1979; (18) tujuan penyelesaian masalah pengungsi adalah penempatan pengungsi di negara ketiga dan repatriasi ke negara asalnya dalam waktu yang ditentukan sesuai

dengan Konperensi Jenewa tentang pengungsi tahun 1989; (19) ASEAN puas terhadap penempatan kembali para pengungsi yang datang sebelum masa akhir mereka diterima sebagai pengungsi telah melampaui target yang ditentukan dalam waktu dua tahun pertama pelaksanaan penyelesaian masalah pengungsi secara menyeluruh atau *Comprehensive Plan of Action* (CPA); (20) meskipun penurunan arus manusia perahu Vietnam ke ASEAN akhir-akhir ini menurun, tetapi ASEAN tetap mengharapkan Vietnam untuk selalu memantau warganya yang meninggalkan tanah airnya secara diam-diam guna menghindari pemulangan mereka secara paksa; (21) meningkatnya pengungsi yang menolak pemulangan kembali merupakan kondisi yang tidak dapat diterima dan sangat memprihatinkan ASEAN; (22) ASEAN mendesak agar dibentuk pusat-pusat penampungan warga Vietnam yang sesuai dengan CPA dan dikelola secara internasional sebagai pemecahan jalan tengah atas masalah repatriasi secara paksa (*Antara*, 21-7-1991); (23) perkembangan di Eropa Timur dan Eropa Tengah telah memberi sumbangan bagi perbaikan iklim ekonomi dan politik dunia, khususnya di Eropa; (24) meskipun Eropa Timur dan Tengah memerlukan bantuan untuk pembangunan, tetapi negara-negara maju agar tetap memperhatikan negara-negara berkembang (*Antara*, 22-7-1991).

Anggota Komisi I DPR RI, Marzuki Darusman, mengatakan kepada Antara di Kuala Lumpur tanggal 22 Juli 1991 bahwa: (1) ASEAN terkadang agak membatasi gerak Indonesia, terutama karena adanya mekanisme musyawarah dan mufakat yang harus mempertimbangkan hubungan dengan negara-negara tetangganya; (2) gerak politik luar negeri Indonesia menjadi terbatas karena beban sejarah masa lalu, sehingga setiap kali untuk melangkah dari tingkat yang wajar dikawatirkan akan dianggap sebagai upaya melakukan dominasi. Beban sejarah masa lalu Indonesia hampir sama dengan Jepang terutama dalam skala geografisnya; (3) Indonesia dihadapkan pada suatu pilihan antara politik luar negeri Indonesia dan politik luar negeri ASEAN yang sering mengurangi fleksibilitas Indonesia, tetapi keduanya juga dapat saling mengisi; (4) beban sejarah itu dapat dikikis sedikit demi sedikit melalui kerja sama intra ASEAN yang lebih kuat dan transparansi politik di masing-masing anggotanya. Pengertiannya adalah: (a) setiap negara anggota ASEAN boleh berkepentingan terhadap perkembangan dalam negeri tetangganya tetapi tidak mencampuri urusan dalam negerinya; (b) jaringan intra ASEAN harus diperkuat untuk cepat merekam berbagai deviasi politik dan mencari jawaban-

nya; (c) harus dicapai integrasi maksimal untuk memperkecil kemungkinan timbulnya usaha penyelesaian politik atas suatu masalah secara konfrontatif; (d) transparansi politik untuk mengukur situasi politik tentang ada tidaknya persetujuan rakyat terhadap pengambilan keputusan politik tertentu; (e) negara-negara anggota ASEAN harus selalu menyadari perlunya kontrol terhadap politik luar negeri; (5) agar kerja sama ASEAN tetap langgeng maka pola kerja samanya harus dimantapkan dengan meninggalkan pola kerja sama yang bersandar pada aspirasi pada tokoh menjadi pola yang benar-benar dilandasi oleh institusi pembangunan; (6) ASEAN harus berani berpaling untuk mengatasi semua tantangan dengan menterjemahkan aspirasi tokoh menjadi bentuk kerja sama institusional; (7) aspirasi para tokoh ASEAN selama ini telah memberikan landasan kuat bagi kerja sama di antara negara anggotanya, tetapi masih perlu disempurnaan dan dimantapkan; (8) ASEAN perlu melaksanakan program politik untuk saling memperkenalkan tokoh-tokoh pemimpin generasi baru; (9) budaya politik ASEAN mempunyai ciri khas yang lebih menghargai hubungan-hubungan pribadi daripada hubungan formal; (10) pengalihan pola ini tidak akan gagal karena pada dasarnya kerja sama di antara negara lahir dari adanya kebutuhan-kebutuhan praktis untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pembangunan nasional masing-masing; (11) institusi yang akan dibangun dan dikembangkan itu harus memungkinkan tokoh-tokoh yang baru lahir dapat melakukan dialog (*Antara*, 22-7-1991).

Menlu Filipina Raul Manglapus mengatakan se usai penutupan sidang bahwa: (1) ASEAN harus maju dan meninggalkan sikap lamanya untuk membicarakan masalah keamanan regional secara lebih terbuka; (2) Filipina menginginkan perundingan masa depan pangkalan bukan menjadi proposal ASEAN; (3) ASEAN menyerukan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, Myanmar dan Laos, meningkatkan kerja sama keamanan dengan ASEAN (*Bisnis Indonesia*, 22-7-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) meskipun pihak-pihak yang bertikai di Kamboja telah mencapai kemajuan besar di Beijing, tetapi ASEAN tidak terlalu optimis karena belum ada kesepakatan mengenai isu-isu kunci; (2) pertemuan AMM di Kuala Lumpur sangat penting artinya bagi persiapan KTT ASEAN IV di Singapura tanggal 27-28 Januari 1992 dan negara anggota ASEAN lainnya harus membantu Singapura agar

KTT itu berhasil; (3) agenda KTT akan disiapkan oleh panitia yang beranggotakan semua negara anggota ASEAN, dan salah satunya adalah gagasan EAEG PM Malaysia; (4) Indonesia masih akan mempelajari secara menyeluruh atas konsep pembentukan kelompok ekonomi Asia Timur; (5) KTT ASEAN akan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali (*Antara*, 22-7-1991).

Sebelum meninggalkan Kuala Lumpur menuju ke Jakarta, Wakil PM Uni Soviet, Yuri Maslyukov, mengatakan kepada pers di Bandara Internasional Subang tanggal 21 Juli 1991 bahwa: (1) kunjungan ke Indonesia akan membicarakan masalah ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan kerja sama teknik serta berdialog tentang masalah politik; (2) Indonesia dan Uni Soviet telah memiliki mekanisme konsultasi politik secara formal yang permanen dan praktis; (3) keinginan Uni Soviet untuk menjadi mitra dialog ASEAN hanya tinggal waktu saja; (4) kehadiran Uni Soviet di AMM merupakan kelanjutan kebijakan umum dari keterbukaan dan perestroika untuk meningkatkan hubungannya dengan negara-negara ASEAN; (5) hasil sidang SNC Kamboja akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa Kamboja saat ini; (6) negaranya mendukung konsep ZOPFAN dan kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara; (7) keterlibatan Uni Soviet dalam pembicaraan masalah keamanan di Asia Pasifik perlu disetujui oleh negara-negara anggota PMC; (8) negaranya tidak akan ikut campur dalam masalah bilateral antara Amerika Serikat dan Filipina; (9) Uni Soviet mencari fasilitas kredit US\$200 juta dari Malaysia untuk membeli hasil-hasil pertanian selama dua tahun, tetapi masih dipertimbangkan karena belum ada keputusan akhir dari pemerintah Malaysia (*Kompas*, 22-7-1991).

III. KERJA SAMA EKONOMI

A. KERJA SAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

- Konsep Perdagangan Bebas

Menjelang akhir kunjungannya dua hari di Muangthai untuk membahas upaya meningkatkan kerja sama ekonomi ASEAN, PM Singapura, Goh Chok Tong, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 24 Juni 1991 bahwa: (1) proposal pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (PTA) untuk meningkatkan kerja sama ekonomi ASEAN akan siap pada bulan

Januari 1992 dan akan dibicarakan pada KTT ASEAN di Singapura; (2) proposal itu mencantumkan integrasi perekonomian ASEAN secara bertahap menuju FTA, seperti yang dilaksanakan di Amerika Utara saat ini; (3) proposal yang dibuat Muangthai akan siap pada bulan September 1991 dan akan dibawa ke sidang para Menteri Ekonomi ASEAN; (4) pemerintah Muangthai telah membentuk satu komite yang beranggotakan para Menteri dan akan membicarakan gagasan itu dengan para Menteri ASEAN lainnya; (5) gagasan pembentukan FTA timbul karena ASEAN merasa cemas atas pembentukan kelompok perdagangan Pasar Tunggal Eropa (ME) dan blok perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA); (6) pembentukan blok ME dan NAFTA itu akan memperkuat posisi mereka dalam bernegosiasi dengan satu negara secara individu karena tidak berimbang; (7) satu negara ASEAN tidak akan mampu bernegosiasi secara baik dengan satu blok yang didukung oleh beberapa negara anggotanya; (8) Muangthai menginginkan integrasi pasar ASEAN tercapai dalam 10 tahun, tetapi Singapura menganggap jangka waktu yang paling tepat adalah 20 tahun; (9) langkah awal integrasi akan dimulai dengan pengurangan tarif di dalam ASEAN dan usul Indonesia mengenai tarif efektif bersama (CEPT) dapat digunakan setiap saat akan dipertimbangkan; (10) jika ASEAN berhasil mewujudkan integrasi ekonomi, negara lain yang ingin menjadi anggota ASEAN dapat dipertimbangkan; (11) Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan tidak perlu bergabung dalam ASEAN tetapi dapat menjadi anggota ASEAN Economic Arrangement (AEA); (12) Singapura mendukung gagasan pembentukan Kelompok Ekonomi Asia Timur (EAEG) yang diajukan oleh Malaysia (*Business Indonesia*, 27-6-1991).

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan RI, Paian Nainggolan, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 6 Agustus 1991 bahwa: (1) konsep perdagangan bebas ASEAN (FTA) yang diajukan oleh Muangthai berkaitan dengan besarnya bea masuk semua komoditi masing-masing negara anggota. Oleh sebab itu semua anggota ASEAN harus meneliti kembali tarif bea masuk setiap komoditi di negaranya; (2) tingginya tarif bea masuk barang menyebabkan sulitnya menurunkan atau membebaskan bea masuk; (3) melalui FTA sangat sulit menyesuaikan bea masuk satu barang yang mencapai 40% menjadi 0%; (4) dua konsep untuk membicarakan masalah perdagangan ASEAN yaitu ASEAN PTA (*Preferential Trade Arrangement*) dan preferensi tarif efektif (CEPT) sulit digabungkan; (5) ASEAN PTA

merupakan konsep perdagangan lama yang memperdagangkan sekitar 15.000 jenis dagangan. Kelemahan konsep ini adalah: (a) cenderung membodohi diri sendiri karena masing-masing negara bertekad dapat mengkontribusi barang yang memperoleh potongan dari PTA; (b) potongan PTA 50% mendorong setiap negara untuk mengajukan barang dalam jumlah besar yang tidak biasa diperdagangkan dan *not even exist trade*; (c) tidak efektif seperti yang diharapkan karena tujuan utamanya adalah bukan tarif barang, tetapi besarnya potongan harga barang; (6) tujuan dasar konsep CEPT yang diusulkan oleh Indonesia adalah tarif yang efektif sehingga terdapat satu tekad bersama agar bea masuk bagi suatu barang efektif di seluruh ASEAN; (7) berbagai langkah yang diperlukan untuk menerapkan CEPT; (a) pelaksanaannya secara berjenjang dan harus dimulai dari bea tarif barang yang terendah yaitu dari 5% menjadi 0%, 10% menjadi 5%, 15% menjadi 10% dan seterusnya; (b) agar mudah disepakati ditetapkan dahulu barang yang bea masuknya rendah; (8) konsep CEPT itu sangat pragmatis karena semua komoditi ASEAN yang bea masuknya 5% mudah disepakati penghapusannya. CEPT juga merupakan konsep yang paling mudah dan pragmatis untuk menuju suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN; (9) kelemahan konsep perdagangan bebas (FTA): (a) barang-barang yang diperdagangkan bukan barang konsumsi, tetapi barang-barang *non consumers goods*, seperti semen dan produk kimia; (b) suatu negara akan sulit untuk menurunkan bea masuk barang yang mencapai 40%. Semua barang yang bea masuknya tinggi sangat sulit untuk dibebaskan; (c) ada kemungkinan campur tangan pihak ketiga karena barang yang beredar antar ASEAN dapat berasal dari negara lain (*Pelita*, 7-8-1991).

B. KERJA SAMA INDUSTRI, MINERAL DAN ENERGI

1. Kerja Sama Industri

Antara tanggal 22 Juli 1991 memberitakan bahwa: (1) pada tanggal 20 Juli 1991 para Menlu ASEAN menandatangani kesepakatan tambahan atas proyek pertambangan potash ASEAN yang pembangunannya dikuasakan kepada Muangthai untuk dijadikan salah satu proyek industri ASEAN (AIP); (2) proyek yang berkapasitas satu juta ton potash (garam abu) per tahun itu dijadwalkan mulai berproduksi tahun 1995; (3) proyek yang mencakup daerah seluas 100 kilometer persegi itu akan dibangun di distrik Bannet Narong propinsi

Chaiyaphum; (4) proyek ini diperkirakan akan berusia sekitar 30 tahun dengan perhitungan keuntungan investasi sekitar 18% atau lebih dan mampu memenuhi kebutuhan pupuk potash negara-negara ASEAN dengan harga bersaing; (5) saham proyek itu dari Muangthai 71%, Indonesia dan Malaysia masing-masing 13% serta Filipina, Singapura dan Brunei Darussalam masing-masing 1%.

2. Kerja Sama Energi

Pertemuan para Menteri Energi ASEAN ke-10 berlangsung di Singapura tanggal 22 Agustus 1991, dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Menteri Negara Singapura, Mah Bow Tan, Menteri Pembangunan Brunei Darussalam, Pg. Dato Seri Paduka D.Hj. Ismail bin Pg. Hj. Djamit, Menteri Perdagangan dan Energi Indonesia, Ginanjar Kartasasmita, Menteri Energi, Telekomunikasi dan Pos Malaysia, Dato Seri S. Samy Vellu, Direktur Pelaksana Kantor Urusan Energi Filipina, Wenceslao R De La Paz dan Menteri pada Kantor Perdana Menteri Muangthai, Dr. Phaichitr Uathvikul, untuk membahas peningkatan kerja sama energi dan mengkaji ulang sejumlah proyek kerja sama yang telah disepakati (*Kompas*, 23-8-1991).

Deputi PM Singapura, BG Lee Hsien Loong, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) kerja sama energi ASEAN dapat meningkatkan ketahanan anggotanya untuk menghadapi fluktuasi harga minyak bumi, khususnya anggota yang tidak memiliki tambang minyak; (2) kerja sama energi dibutuhkan untuk menghadapi gejolak harga; (3) para pejabat tinggi yang membidangi energi agar mengkaji ulang sejumlah proyek kerja sama di bidang ini dan membahas proyek-proyek baru yang dapat dikerjakan; (4) kerja sama energi ASEAN telah mencapai banyak kemajuan, khususnya setelah disepakatinya *ASEAN Petroleum Security Arrangement* (APSA), oleh karena itu kerja sama model ini harus dikembangkan oleh ASEAN; (5) kerja sama ekonomi dan energi ASEAN tidak harus selalu melibatkan seluruh negara anggota ASEAN di setiap proyeknya dan menunggu konsensus bersama; (6) proyek yang hanya melibatkan dua atau tiga negara anggota ASEAN dapat dikembangkan dan bila ternyata berpotensi negara anggota lainnya dapat dilibatkan (*Suara Karya*, 23-8-1991); (7) ASEAN perlu mempererat kerja sama dalam bidang yang berkaitan dengan pengembangan dan pemakaian sumber-sumber energi, keahlian manajemen energi dan pemanfaatan infra-

struktur; (8) pengadaan energi dengan harga bersaing sangat vital untuk pembangunan ekonomi, karena itu krisis-krisis minyak seperti tahun 1973 dan 1979 serta invasi Irak ke Kuwait agar dihindari; (9) negara-negara yang tidak mempunyai hidrokarbon dan sumber energi lainnya tidak dapat membatasi ketergantungannya pada energi impor dan tidak luput dari fluktuasi harga minyak; (10) kerja sama energi ASEAN dapat membantu negara konsumen mendiversifikasikan ketergantungannya dan memanfaatkan energi secara lebih efisien; (11) pertumbuhan ekonomi yang tenang atau melambung secara dramatis dapat meningkatkan pemakaian energi; (12) perbedaan tujuan dan prioritas pembangunan di antara negara anggota ASEAN perlu diperhatikan dalam setiap kerja sama agar proyek yang menguntungkan dua atau tiga negara anggotanya dapat dilaksanakan; (13) keputusan Malaysia dan Singapura untuk mensuplai gas alam guna pembangkit tenaga listrik di Singapura adalah tepat dan sesuai dengan perputaran waktu dalam lingkungan yang kompetitif dan dinamis; (14) ASEAN memiliki dasar-dasar untuk memperluas kerja sama agar kesinambungan pertumbuhan ekonominya dapat dicapai seperti: (a) saling melengkapi pembangunan ekonomi; (b) tersedianya sumber dalam alam dan manusia; (c) lokasi yang strategis dan stabilitas politik; (15) tujuan utama didirikan ASEAN adalah menciptakan lingkungan yang stabil dan aman agar setiap negara anggotanya mampu dan berhasil melakukan pembangunan; (16) ASEAN telah berperan untuk mewujudkan stabilitas regional sehingga pembangunan ekonomi setiap anggotanya dapat tumbuh tanpa terhambat oleh pertentangan; (17) Singapura akan sulit menarik investasi asing yang mempercepat proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonominya tanpa stabilitas yang diciptakan ASEAN; (18) dalam dekade 1990-an kerja sama ekonomi ASEAN harus lebih maju karena lingkungan bisnis global semakin kompetitif; (19) ASEAN harus bekerja sama untuk menerobos proteksi yang dilakukan oleh banyak negara; (20) kekurangan dan kelebihan masing-masing negara dalam kerja sama segitiga Indonesia-Malaysia-Singapura akan dapat saling melengkapi; (21) proyek-proyek di segitiga itu akan melahirkan kekayaan baru dan melebarkan pasar serta menciptakan pasaran baru (*Kompas*, 23-8-1991).

Menteri Pertambangan dan Energi Ginanjar Kartasasmita mengatakan: (1) kestabilan harga minyak dunia sesuai dengan harga referensi OPEC, US\$21 barel, adalah penting; (2) masuknya produksi minyak Irak dan Kuwait dalam waktu dekat akan mempengaruhi harga

minyak dunia; (3) Irak diperkirakan dapat memproduksi lebih dari dua juta barrel per hari, tetapi karena dibatasi oleh DK PBB maka produksinya diperkirakan hanya sekitar 0,5 juta barrel per hari seperti kemampuan Kuwait pada enam bulan pertama tahun 1992; (4) bila OPEC mampu mempertahankan tingkat produksinya (ditambah dengan rata-rata produksi Irak dan Kuwait) maka produksi keseluruhan OPEC dalam enam bulan pertama 1992 diperkirakan mencapai 23,3 juta barrel per hari dan 24,3 juta barrel per hari pada enam bulan kedua; (5) masalah harga minyak, selain ditetapkan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang bersumber pada suhu politik dunia (*Suara Pembaruan*, 23-8-1991).

Pertemuan sepakat untuk: (1) mengembangkan kerja sama ketenagalistrikan dan penggunaan batu bara; (2) membangun sembilan proyek kerja sama kelistrikan yang pelaksanaannya berada di bawah koordinasi pimpinan perusahaan kelistrikan negara masing-masing seperti: (a) pembangunan mini hidro dan riset serta pengembangan engineering (Indonesia); (b) aplikasi komputer, interkoneksi dan pengembangan pelatihan (Malaysia); (c) proyek kelistrikan desa dan kota dan pusat informasi tenaga listrik (Muangthai); (d) pengembangan panas bumi (Filipina), dan standarisasi (Singapura); (3) menajagi empat buah proyek interkoneksi listrik antar 4 negara anggota ASEAN (Serawak-Kalimantan Barat, Serawak-Brunei-Sabah, Sumatera-Semenanjung Malaysia dan Batam Singapura) (*Suara Karya*, 23-8-1991).

Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita mengatakan kepada pers di Singapura bahwa: (1) Filipina meminta Indonesia untuk memperjuangkan stabilitas harga minyak; (2) permintaan keringanan harga minyak dari negara anggota ASEAN lainnya diserahkan pada kondisi pasar minyak, sebab Indonesia tidak dapat menjual dengan harga murah; (3) Indonesia hanya dapat memberikan keringanan berupa cara pembayaran yang lebih panjang; (4) pembentukan Komite Energi ASEAN merupakan satu masalah yang belum disepakati, karena terdapat perbedaan prinsip antara Malaysia yang menganggap energi sebagai komoditi dan Indonesia beranggapan energi merupakan suatu yang khusus (*Suara Pembaruan*, 23-8-1991); (5) ada tiga studi *ad hoc* yang dilakukan di bawah koordinasi para pemimpin kelistrikan ASEAN, yaitu: (a) studi *ad hoc* mencakup konsep built, operasional dan transfer (BOT) dilakukan Indonesia; (b) standarisasi pembangkit panas bumi ukuran kecil di Filipina; (c)

pemakaian pembangkit *combined cycle* di Muangthai (*Kompas*, 23-8-1991); (6) menurut hasil studi yang dipublikasikan oleh International Gas Union, Asia Tenggara merupakan tempat penampungan gas alam. Tetapi masih memerlukan pembuktian dengan pemboran karena masih merupakan spekulasi; (7) kemungkinan untuk membagi kekayaan gas alam melalui jaringan pipa gas di Asia Tenggara adalah tepat karena merupakan cara yang paling murah; (8) Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia merupakan produsen gas alam yang besar, sedangkan Filipina dan Singapura tidak memilikinya; (9) pelaksanaan pembangunan gas sekarang ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing negara, sehingga jaringan pipa gas belum menjadi prioritas utama Indonesia; (10) Indonesia sedang merencanakan pembangunan pipa gas dari Natuna dan Matak di Laut Cina Selatan untuk memenuhi kebutuhan energi di Batam dan Singapura. Jaringan pipa itu dapat dilanjutkan ke Arun atau untuk melayani konsumen di Pulau Jawa; (11) pembangunan jaringan pipa gas ASEAN akan dikaitkan dengan hubungan pipa bilateral yang telah direncanakan sebelumnya; (12) jaringan itu akan menghubungkan ekspor Indonesia, Malaysia, Brunei dan Muangthai terus ke Singapura dan Filipina; (13) penelitian pembangunan pipa gas itu mulai dilakukan pada bulan September 1991 dan berlangsung selama 18 bulan (*Kompas*, 26-8-1991).

Pada saat yang sama, Dirut PLN Ir. Ermansyah Jamin mengatakan bahwa: (1) proyek interkoneksi Batam-Singapura dapat segera direalisasi karena Singapura memiliki kelebihan kapasitas listrik yang diekspor ke Batam melalui kabel laut. Singapura dapat mengekspor listrik ke Batam jika Indonesia bersedia menggelar kabel laut sepanjang 28 kilometer untuk menghubungkan kedua tempat tersebut; (2) Indonesia menawarkan kepada negara anggota ASEAN lainnya, terutama Malaysia, Filipina dan Muangthai untuk membeli produksi batu baranya dalam kontrak jangka panjang, karena pembelian selama ini dilakukan melalui tender biasa; (3) negara anggota ASEAN lainnya dapat meningkatkan impor batu baranya dari Indonesia, terutama Malaysia yang 60% kebutuhan batu baranya di impor dari Australia (*Suara Karya*, 23-8-1991).

Ketua Komisi IV DPR RI, Tadjuddin Noer Said, mengatakan kepada Merdeka tanggal 24 Agustus 1991 bahwa: (1) kerja sama energi ASEAN sangat tepat untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan sangat menguntungkan bagi Indonesia yang memiliki cadangan energi yang relatif besar; (2) negara-negara anggota ASEAN harus meningkatkan

saling pengertian agar potensi energi yang terkandung di masing-masing negaranya dapat dimanfaatkan secara optimal; (3) ASEAN harus mampu melihat potensi gas alam yang dimilikinya untuk jangka panjang dan berorientasi pada azas kemanfaatan sumber daya, baik untuk dalam negeri maupun untuk diekspor; (4) hampir semua negara penghasil gas di ASEAN cenderung berorientasi pada pasar Jepang, karena harganya cukup menarik; (5) ASEAN harus memulai memperluas pemasaran gas alamnya agar tidak tergantung pada satu negara. Dengan demikian harganya tidak dapat dipermainkan, sehingga terhindar dari kerugian; (6) pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan cadangan sumber daya energi yang dimiliki ASEAN merupakan pendorong untuk lebih memperbaiki kerja sama ASEAN; (7) kerja sama energi ASEAN akan memberi keuntungan bagi masing-masing negara anggotanya, baik secara langsung maupun tak langsung; (8) kerja sama di bidang kelistrikan dan batu bara merupakan peluang untuk memanfaatkan sumber daya energi yang ada di wilayah terdekat; (9) untuk mengembangkan potensi sumber energi batu bara di salah satu negara ASEAN diperlukan perlindungan tarif bea masuk bagi energi yang dihasilkan oleh salah satu negara anggota ASEAN yang dijual ke negara anggota lainnya agar harganya lebih rendah dan mampu bersaing dengan produsen di luar kawasan ASEAN; (10) negara anggota ASEAN yang membeli batu bara dari Indonesia memiliki keuntungan yang relatif besar karena jaraknya yang dekat sehingga biaya angkutnya menjadi lebih murah; (11) jika preferensi tarif ini diberlakukan di ASEAN tentu akan mendorong pengembangan batu bara di Indonesia yang memiliki cadangan besar untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan ini; (12) pemerintah Indonesia harus melakukan penataan yang mendasar untuk mengembangkan potensi batu baranya. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat di antara produsen batu bara di Indonesia yang dapat merugikan penerimaan devisa negara diperlukan penataan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran yang lebih tertib; (13) penataan pasar batu bara sangat strategis di masa mendatang karena pemanfaatan sumber daya ini dapat lebih optimal, sebab batu bara penjualannya dilakukan oleh swasta dan berbeda dengan minyak bumi yang pemasarannya dilakukan oleh pemerintah; (14) untuk menjadikan batu bara sebagai komoditi strategis pengganti minyak, penataannya harus dilakukan sejak dini sebelum dikembangkan secara maksimal.

Dirjen Listrik dan Energi Baru Prof. Dr. Artono Arismunandar mengatakan kepada Kompas tanggal 23

Agustus 1991 bahwa: (1) diperlukan dana US\$3,8 juta untuk meneliti pembangunan jaringan pipa gas alam trans ASEAN; (2) selain dari negara anggota ASEAN sendiri, dana itu juga diperoleh dari suatu sindikat di Italia dan Perancis; (3) setiap negara anggota ASEAN akan memberi sumbangan dalam bentuk natura, seperti tenaga ahli yang telah bekerja di bidang perminyakan; (4) proyek pisanisasi trans ASEAN semakin gencar dibicarakan karena secara ekonomis dapat dilaksanakan untuk melayani kebutuhan energi gas alam seluruh anggota ASEAN; (5) pelaksanaan proyek ini baru dapat direalisasikan setelah hasil studi yang dilakukan disepakati para Menteri Ekonomi Bidang Energi ASEAN; (6) Indonesia mempunyai peluang untuk memasarkan batu baranya yang selama ini telah dirintis ke Filipina, Malaysia dan Muangthai; (7) Muangthai akan segera menandatangani kerja sama untuk penambangan batu bara di Jambi dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk bahan pembangkit listrik di negaranya; (8) usaha interkoneksi kelistrikan akan dikembangkan melalui studi kelayakan proyek antara Serawak-Kalimantan Barat, Serawak-Brunei Darussalam, Sumatera-Semenanjung Malaysia dan Batam-Singapura. Tetapi usaha itu hanya akan difungsikan sewaktu-waktu jika di salah satu negara membutuhkan suplai dari negara lainnya; (9) sistem interkoneksi yang merupakan perpaduan kelistrikan seperti Jawa-Bali belum pernah dilakukan dan belum dikenal di ASEAN; (10) kerja sama interkoneksi Indonesia Singapura masih akan diteliti, karena selain masih membutuhkan listrik, Singapura juga tidak akan mempersoalkan pembangunan pusat pembangkit listrik di Batam; (11) Singapura akan segera membangun pembangkit listrik sendiri berkekuatan 100 MW di Pulau Bintan sejalan dengan pengembangan kawasan pariwisata di daerah itu dengan memanfaatkan BBM untuk memenuhi kebutuhannya sendiri; (12) pengadaan listrik di Batam sangat mendesak sehingga perlu segera dibangun sebuah pembangkit gas turbin; (13) untuk membangun jaringan kabel bawah laut dari Batam ke Singapura perlu pertimbangan yang matang karena sifatnya hanya sementara selama pulau itu belum mendapatkan tenaga listrik yang cukup (*Kompas*, 26-8-1991).

C. KERJA SAMA PANGAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

- Sidang COFAF ke-14

Sidang Komite Pangan, Pertanian dan Kehutanan ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 7 Agustus 1991

untuk membahas: (1) penentuan standar vaksin, impor embrio, karantina hewan dan riset; (2) masalah alih teknologi laboratorium dan program pengawasan penyakit rabies (*Antara*, 7-8-1991).

Seusai membuka pertemuan, Dirjen Peternakan Soehadji mengatakan bahwa: (1) hambatan pembangunan peternakan di wilayah ASEAN adalah rendahnya produktivitas, harga yang tidak stabil dan proteksi oleh negara-negara maju serta kurangnya strategi pasar; (2) 40% penduduk ASEAN adalah peternak yang berpendapatan rendah, karena itu kerja sama peternakan ASEAN perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan mereka; (3) kerja sama peternakan akan lebih ditekankan dalam pengembangan bahan pangan hewani untuk meningkatkan kualitas manusia, perdagangan ternak, kerja sama bidang bioteknologi dan upaya pengamanan plasma nutfah; (4) untuk memajukan program peternakan, pemerintah Indonesia telah meminta pihak swasta agar berperan aktif dalam agribisnis dan agro industri (*Angkatan Bersenjata*, 8-8-1991); (5) Indonesia ditunjuk sebagai pusat informasi penyakit dan produksi ternak di ASEAN, dan sedang berupaya menjalin kerja sama dengan badan-badan internasional agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik; (6) di wilayah ASEAN masih terdapat jenis penyakit hewan mulut dan kuku (PMK), sampar sapi dan radang paru-paru yang dapat merugikan para peternak; (7) Indonesia telah dinyatakan bebas PMK; (8) potensi dan prospek peternakan ASEAN cukup baik karena populasi ternaknya cukup besar (*Antara*, 7-8-1991).

IV. KERJA SAMA NON EKONOMI

A. KERJA SAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

- Pertemuan Menteri Penerangan ASEAN ke-2

Pertemuan para Menteri Penerangan ASEAN ke-2 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 29 Juli - 2 Agustus 1991 untuk mengevaluasi: (1) pengembangan teknologi modern melalui satelit; (2) hasil pertemuan Menpen ASEAN ke-1 di Jakarta 1989 dan upaya pelaksanaannya. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Menpen Harmoko terdiri atas Sekjen Deppen Emir Mangawang, Dirjen PPG Subrata, Dirjen RTF Alex Leo Zulkarnaen, Pemimpin Umum LKBN ANTARA Handjojo Nitimihardjo serta Karo Pengembangan dan Analisa ASEAN Deplu Juwana (*Antara*, 1-8-1991).

Seusai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 19 Juli 1991, Menteri Penerangan Harmoko mengatakan bahwa: (1) pengembangan teknologi modern perlu dilakukan, karena udara ASEAN kemungkinan akan banyak terpengaruh oleh siaran-siaran yang datang dari luar kawasan; (2) ASEAN memerlukan langkah baru yang mengacu pada era globalisasi untuk memandu udara dan ruang angkasanya; (3) penyewaan satelit Palapa mendorong anggota ASEAN cenderung untuk mengembangkan transponder-transponder, sehingga memerlukan pemikiran bersama untuk mengatasinya, khususnya mengenai penyediaan dana; (4) Presiden Soeharto mengharapkan delegasi Indonesia mampu membawakan pemikiran-pemikiran untuk menegakkan tata informasi di ASEAN yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) peningkatan arus informasi yang mendukung pengembangan ASEAN sangat penting, karena itu pengembangan informasi dan komunikasi yang sesuai sangat diperlukan (*Pelita*, 19-7-1991); (6) pertemuan pejabat senior penerangan (SOM) yang berlangsung tanggal 29 Juli 1991 dibagi dalam dua kelompok dan tertutup untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas oleh para Menpen ASEAN (*Antara*, 1-8-1991).

Menpen Harmoko mengatakan kepada pers di Bandara Internasional Subang tanggal 31 Juli 1991 bahwa: (1) kerja sama penerangan antar negara ASEAN perlu lebih diperdalam lagi sejalan dengan majunya teknologi informasi. Indonesia mengajak anggota ASEAN lainnya untuk mengambil langkah bersama guna menghadapi kemajuan teknologi informasi dan sekaligus mengantisipasi kecenderungan gerak kemajuannya di masa mendatang; (2) ditingkatkannya kerja sama penerangan ASEAN semakin memperkokoh ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya dan ketahanan regional kawasan Asia Tenggara; (3) sejak sekarang ASEAN harus mengantisipasi teknologi modern dan tidak perlu takut menerimanya agar pada sepuluh tahun mendatang tidak tertinggal; (4) informasi telah menjadi kebutuhan pokok manusia, karena itu kerja sama informasi ASEAN harus diarahkan untuk mendorong dan menopang pembangunan kawasan dan sekaligus dapat memperkokoh ketahanan nasional dan regional (*Antara*, 1-8-1991).

PM Malaysia, Mahathir Mohammad, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN perlu menyeimbangkan toleransi kepada pers dalam melaksanakan kebebasan yang mereka miliki. Tetapi

toleransi tidak perlu diberikan jika pers terbukti dengan sengaja mengungkapkan kebohongan yang dapat merusak kehidupan bangsa; (2) tugas para Menpen ASEAN berat karena harus bertanggung jawab untuk mewujudkan arus informasi yang bebas dan menjamin terciptanya stabilitas di negara masing-masing; (3) ketidakstabilan di salah satu negara anggota ASEAN selain akan mempengaruhi stabilitas negara anggota lainnya juga stabilitas regional; (4) pemerintah akan gagal melaksanakan tugasnya, jika penyalahgunaan kebebasan pers dibiarkan; (5) tugas pemerintah bukan hanya melindungi kebebasan dan demokrasi tetapi juga menciptakan kehidupan sosial ekonomi yang baik bagi rakyatnya; (6) hak-hak dan kebebasan dalam demokrasi tidak berdiri sendiri, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab, karena itu pemerintah wajib membimbing untuk mewujudkan kebebasan tanpa harus mengubah esensi demokrasi menjadi demokrasi terkendali (*Antara*, 1-8-1991); (7) pemerintah harus menuntun media massa karena kebebasan pers gaya Barat dapat merusak negara-negara yang sedang berkembang. Wartawan Barat hanya membuat cerita-cerita demi hiburan dan uang; (8) meskipun kebebasan pers merupakan esensi demokrasi tetapi pelaksanaannya hanya sepihak; (9) sangat sulit melarang surat kabar dan mengusir reporter tanpa mendapat tamparan dari pihak keempat (*fourth estate*) yang menganggap dirinya lebih bersih (*Kompas*, 2-8-1991).

Pertemuan sepakat untuk: (1) mengkaji penggunaan teknologi informasi canggih bagi kawasan Asia Tenggara; (2) mencari jalan untuk meningkatkan citra ASEAN di dunia internasional; (3) meningkatkan kerja sama media massa, baik media cetak maupun elektronik; (4) mengantisipasi penggunaan teknologi canggih, karena penggunaan teknologi ini mempunyai implikasi yang sangat jauh dan berjangka panjang atas kawasan ASEAN; (5) membuat kajian dan bertukar pengalaman mengenai dampak teknologi canggih terhadap tradisi, budaya dan nilai-nilai asli ASEAN; (6) menugaskan para pejabat senior masing-masing untuk memikirkan cara pendekatan bersama terhadap penggunaan teknologi canggih; (7) menyelenggarakan pertemuan SOM berikutnya di Filipina pada bulan Mei 1992 yang hasilnya akan disampaikan dalam Pertemuan Menpen ASEAN ke-3 di Filipina tahun 1993; (8) menetapkan pertemuan SOM minimal setahun sekali; (9) menggalakan kerja sama penerangan di antara anggota ASEAN dalam basis bilateral (*Antara*, 3-8-1991).

Menteri pada Kantor Perdana Menteri Muangthai, Meechai Viravaidhaya, mengatakan kepada pers di

Bangkok tanggal 3 Agustus 1991 bahwa: (1) wartawan asing perlu didukung untuk mengunjungi negara-negara ASEAN agar memahami kawasan ini; (2) sulit menghentikan wartawan, tetapi ASEAN dapat menunjukkan pentingnya pemberitaan yang lebih baik; (3) para editor merupakan poros penting dalam penyiaran pemberitaan yang tidak fair, karena mereka hanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang laporan yang diterima; (4) menetap dalam jangka waktu yang lama akan membantu memperbaiki kualitas pemberitaan; (5) Muangthai sepakat untuk mendirikan sebuah pusat layanan informasi ASEAN pada konperensi Bank Dunia bulan Oktober 1991 di Bangkok; (6) pembentukan kantor itu merupakan peluang baik bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan peranannya dalam masyarakat internasional, dan memudahkan anggota ASEAN memberikan informasi kepada negara lain; (7) para wartawan asing akan dapat memperoleh informasi tentang individu negara-negara secara langsung dari kantor tersebut; (8) setiap negara anggota ASEAN hendaknya menyediakan tempat khusus bagi warga negara ASEAN agar mencerminkan kerja sama yang lebih kuat (*Antara*, 5-8-1991).

Menpen Harmoko mengatakan pada pers di Bandara Soekarno-Hatta sepulangannya dari Kuala Lumpur mengikuti Konperensi Menpen ASEAN bahwa: (1) ketimpangan arus informasi antara negara maju dan berkembang akan dijadikan agenda penting dalam pertemuan kerja sama ASEAN di masa mendatang; (2) kerja sama penerangan antar negara ASEAN selama ini mencapai banyak kemajuan; (3) arus informasi media cetak dan elektronik yang ada harus diarahkan ke sasaran yang tepat, dengan demikian dapat memperkuat ketahanan masing-masing negara dan stabilitas regional; (4) perlu segera diadakan pertemuan para pejabat senior penerangan ASEAN yang lebih khusus untuk membahas tentang kehadiran teknologi canggih dalam era globalisasi informasi; (5) setiap wartawan asing yang bertugas di ASEAN seharusnya memahami dan mengerti sistem nilai yang dianut oleh masyarakat ASEAN; (6) media asing bukan saja memiliki hak untuk mengembangkan kebebasan persnya, tetapi juga harus mampu mengembangkan tanggung jawabnya atas sistem nilai yang dianut oleh masyarakat ASEAN, agar pemberitaan yang memutar balikan fakta dapat dihindarkan; (7) Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengembangkan arus informasi yang dapat langsung menyentuh masyarakat di pedesaan; (8) Indonesia akan mengeluarkan izin cetak jarak jauh seperti yang telah dilakukan oleh Malaysia dan Singapura, karena itu masyarakat pers Indonesia harus sudah berani dan siap menerimanya; (9) cetak jarak jauh bagi media massa In-

Indonesia mempunyai arti yang sangat penting, karena setiap warga Indonesia yang berada di tempat terpencil mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat; (10) konsep cetak jarak jauh ini diusulkan oleh sebuah konsorsium swasta nasional, dan bahkan *Harian Singgalang* dari Sumatera Barat telah mengajukan proposal untuk melakukannya di Jakarta (*Angkatan Bersenjata*, 5-8-1991).

PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 12 Agustus 1991 bahwa: (1) negara-negara Barat menggunakan organisasi non pemerintah untuk menyabot stabilitas negara-negara sedang membangun; (2) beberapa kelompok lingkungan dari Barat telah berhasil memanfaatkan orang-orang Malaysia sebagai alat untuk menghambat pembangunan ekonomi dan ekspor lokal untuk bersaing dengan produk Barat; (3) beberapa negara maju telah memanfaatkan NGO untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka dan mengaitkannya dengan masalah perlindungan lingkungan serta hak asasi manusia (*Pelita*, 14-8-1991).

Menteri Penerangan Malaysia, Mohamed Rahmat, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 13 Agustus 1991 bahwa: (1) media Barat dan kelompok pers asing tidak menginginkan PM Malaysia Mahathir Mohammad berhasil membangun negerinya; (2) pemerintah Malaysia sedang mengambil langkah-langkah untuk menjamin rakyatnya agar tidak dijajah secara mental; (3) pemerintah sedang merancang kebijaksanaan penyiaran dan informasi baru serta membentuk sebuah unit internasional dalam Radio dan TV Malaysia; (4) Malaysia tidak akan mengizinkan pihak swasta menggunakan piringan-piringan satelit untuk menerima siaran televisi asing.

B. KERJA SAMA LINGKUNGAN HIDUP

1. Seminar Pengaturan Hukum Laut

Seminar Nasional Pengaturan Hukum Laut yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran membahas masalah Perlindungan dan Pelestarian Laut berlangsung di Bandung tanggal 29 Juli 1991.

Mantan Menlu RI, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) ASEAN sejak sekarang agar menyusun rencana kerja sama darurat regional untuk melindungi pencemaran dan mencegah masuknya bahan-bahan beracun ke da-

lam laut; (2) ASEAN perlu membentuk Badan Regional untuk mencegah pencemaran laut; (3) banyak sumber pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan laut di Asia Tenggara, seperti kapal tanki dan akibat pembersihannya serta pembuangan bahan-bahan beracun ke dalam laut; (4) ASEAN sebaiknya belajar pengalaman dari berbagai negara maju yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan; (5) Indonesia telah dihadapkan pada berbagai studi dan penelitian yang mendesak sehingga memerlukan tenaga ahli, dana dan komitmen bersama untuk melakukannya; (6) lima macam studi yang perlu segera dilaksanakan Indonesia adalah: (a) *baseline studies* untuk mengembangkan dan mengelola kekayaan alam, baik yang dapat diperbarui maupun tidak; (b) studi iklim global sebagai pemandu; (c) studi tingkat pencemaran yang harus segera dilaksanakan, karena selain bermanfaat bagi eksplorasi juga bagi kesejahteraan penduduk secara langsung; (d) studi ekosistem pantai yang perlu diamati secara tuntas untuk mengetahui bentuk-bentuk koral, delta dan lain-lainnya; (e) studi untuk menentukan kawasan suaka atau taman laut (*Suara Pembaruan*, 30-7-1991).

Sementara itu, Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa: (1) ASEAN perlu terlebih dulu melakukan suatu kaji banding untuk mengelola kekayaan ZEE; (2) potensi perguruan tinggi di Indonesia Bagian Timur dalam bidang kelautan harus benar-benar dikembangkan; (3) persoalan lingkungan tidak berhenti di tapal batas, karena itu diperlukan kerja sama antar negara anggota ASEAN; (4) sebelum pengambilan kekayaan laut menjadi suatu yang berbahaya dan tidak menguntungkan lagi perlu segera diambil langkah dan tindakan yang konkret; (5) perjanjian antara Indonesia dan negara tetangga untuk mengatur pengambilan kekayaan laut sangat diperlukan dan hendaknya juga meliputi penangkapan ikan; (6) usaha ke arah tercapainya menuju perjanjian tentang perikanan secara yuridis bagi Indonesia tidak akan mengalami hambatan karena dijamin oleh adanya UU Perikanan No. 9 Tahun 1965, meskipun masih perlu perjanjian untuk memperjelas ZEE Indonesia (*Suara Pembaruan*, 30-7-1991).

2. Lingkungan Hidup dalam Ekonomi

Asisten Menteri KLH Dr. Suta Djajadiningrat mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 30 Juli 1991 bahwa: (1) Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya berusaha mencari kesepakatan untuk

memasukkan faktor lingkungan hidup dalam sektor ekonomi; (2) ASEAN akan membuktikan teori konvensional ekonomi yang menilai sumber daya alam adalah nol sudah tidak dapat dipertahankan lagi; (3) unsur sumber daya alam seharusnya masuk dalam modal produksi, sebab sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis; (4) sumber daya alam yang tidak dimasukkan sebagai nilai ekonomi seharusnya mendapat harga tertentu; (5) Singapura merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah memasukkan faktor lingkungan hidup ke dalam sektor ekonomi, dengan menetapkan batasan jumlah mobil pribadi yang dapat masuk kota. Ini untuk mengatur agar udara tetap bersih; (6) pemerintah Singapura menetapkan efisiensi pemakaian dengan: (a) sistem banyaknya penumpang dalam satu mobil; (b) sistem lisensi mobil berdasarkan mekanisme pasar secara lelang; (7) sistem lisensi membatasi setiap orang yang ingin memiliki mobil kedua dan ketiga untuk terlebih dulu mempertimbangkannya secara matang. Pemilikan mobil yang kedua akan dikenakan beban biaya, misalnya pajak, yang lebih besar dari pemilikan mobil pertama (*Merdeka*, 1-8-1991).

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. PERTEMUAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOGNYA (PMC)

Seusai mengadakan sidang tahunan, para Menlu ASEAN mengadakan pembicaraan dengan mitra dialognya (*Post Ministerial Conference - PMC*) yang diwakili oleh Menlu AS, James Baker, Menlu Jepang, Taro Nakayama, Menlu Australia, Gareth Evans, Menlu Selandia Baru, Don McKinnon, Menlu Kanada, Barbara McDougall, Menlu Korea Selatan, Lee Sang Ock dan Komisioner ME, Hans van Den Broek, di Kuala Lumpur, tanggal 22-24 Juli 1991. Pertemuan itu akan dilangsungkan secara 6 + 7 (enam negara ASEAN dan tujuh negara mitra dialog). Tetapi dalam sidang-sidang tertutup dilangsungkan secara 6 + 1 (enam negara ASEAN dan setiap negara mitra dialog).

Selain kecenderungan-kecenderungan regional dan keamanan, mereka juga membahas kerja sama ekonomi dengan rincian sebagai berikut: (1) ASEAN-Jepang: kerja sama perdagangan, investasi, industri, kerja sama pembangunan dan kerja sama kebudayaan; (2) ASEAN-Korea Selatan: kerja sama perdagangan,

pariwisata, investasi dan berbagai masalah lain; (3) ASEAN-Selandia Baru: perdagangan, investasi, kerja sama pembangunan dan berbagai masalah lain; (4) ASEAN-AS: hubungan ekonomi dan berbagai permasalahan lain; (5) ASEAN-Australia: perdagangan, investasi, kerja sama pembangunan, pendidikan, sains dan teknologi, telekomunikasi, lingkungan hidup dan lain-lainnya; (6) ASEAN-Kanada: kerja sama industri dan perdagangan, kerja sama pembangunan dan lain-lainnya; (7) ASEAN-ME: kerja sama perdagangan dan ekonomi serta kerja sama pembangunan (*Suara Karya*, 22-7-1991).

Korea Selatan yang pada mulanya merupakan mitra sektoral negara-negara ASEAN, kini statusnya mulai ditingkatkan menjadi mitra penuh.

Menlu Korea Selatan, Lee Sang Ock, mengatakan bahwa: (1) walaupun dunia sekarang sedang dilanda proteksionisme dan resesi, pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN cukup pesat; (2) kerja samanya di bidang politik dan keamanan dengan negara-negara ASEAN mempunyai arti penting (*Antara*, 22-7-1991).

Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan bahwa ada beberapa kemajuan penting dalam penyelesaian masalah Kamboja. Masyarakat internasional hendaknya mengikuti cara ASEAN dan Australia untuk mengakreditasikan wakil-wakilnya pada Dewan Nasional Tertinggi (ANC) (*Antara*, 22-7-1991).

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, Don McKinnon mengatakan bahwa: (1) kerja sama dengan negara-negara ASEAN mempunyai arti penting; (2) ASEAN tidak saja penting bagi keamanan dan kemakmuran di Asia Tenggara tetapi juga bagi Selandia Baru. Ada 5 masalah penting yang harus dibicarakan: (a) masalah Kamboja; (b) ketergantungan antar negara; (c) keamanan Asia-Pasifik; (d) kerja sama perdagangan dan ekonomi Asia-Pasifik; (e) perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay; (3) ASEAN agar terus memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Selandia Baru (*Antara*, 22-7-1991).

Dalam pidato pembukaan PMC Menlu Malaysia, Datuk Abdullah Badawi, mengatakan bahwa: (1) pengaturan keamanan seperti *Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE)* tidak bisa diterapkan di Asia Pasifik; (2) masalah keamanan harus dilihat secara menyeluruh, dan bukan hanya menekankan pada pentingnya elemen militer, karena hal itu akan merusak

persepsi hubungan antar negara. Pendekatannya dilakukan dengan cara saling ketergantungan dan kepercayaan melalui kerja sama ekonomi dan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara damai. Masalah keamanan dan kesejahteraan negara tergantung pada kerja sama ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara masing-masing; (3) peningkatan keamanan di Asia Pasifik dapat dilakukan berdasarkan konsep ZOPFAN, *Treaty of Amity and Cooperation* dan pengaturan keamanan bilateral yang sudah ada di negara-negara ASEAN; (4) negara-negara yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di masa lalu maupun sekarang, harus bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan itu; (5) ASEAN meminta kepada masyarakat internasional untuk mempertimbangkan pemulihan hutan-hutan oleh negara-negara yang dianggap telah merusak lingkungan (*Suara Pembaruan*, 22-7-1991); (6) peningkatan kerja sama ekonomi regional yang tidak menjurus ke arah pembentukan blok-blok ekonomi merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong stabilitas kawasan dan terbentuknya keamanan wilayah; (7) negara-negara mitra dialog mengakui bahwa ASEAN merupakan salah satu badan regional yang mampu bertahan dan berkembang dengan baik; (8) sebuah forum yang bersifat konsultatif yang didasarkan pada kerja sama ekonomi ASEAN, dan mengikutsertakan negara-negara Asia Timur akan menunjang perkembangan ekonomi dan memantapkan sistem perdagangan terbuka (*Kompas*, 23-7-1991).

Menlu Jepang, Taro Nakayama, mengatakan bahwa: (1) sebagian besar peningkatan investasi Jepang di ASEAN adalah di bidang industri yang berorientasi ekspor, yang diharapkan akan mempercepat proses alih teknologi; (2) hubungan ASEAN-Jepang selama sepuluh tahun terakhir, di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata berjalan lancar; (3) Jepang perlu meningkatkan peranan politiknya sebanding dengan peranannya di bidang ekonomi di Asia Pasifik dan dunia; (4) Jepang mengajak ASEAN untuk memperluas dialog, tidak saja di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik, keamanan dan sebagainya; (5) dalam kerangka persetujuan kerja sama keamanan Jepang-AS, Jepang menyediakan kurang lebih 140 jenis fasilitas dan tempat bagi angkatan bersenjata AS. Untuk itu Jepang menanggung keuangan, US\$3 milyar lebih per tahun dalam bentuk dukungan tuan rumah (*host nation support*). Pada tahun 1995 dukungan tuan rumah ini, direncanakan mencapai 70% dari pengeluaran angkatan bersenjata AS yang berkedudukan di Jepang, tidak ter-

masuk gaji personil militer dan komponen-komponen sipil (*Antara*, 23-7-1991); (6) secara tradisional Jepang menjalankan pendekatan komprehensif atas masalah keamanan, yang difokuskan dalam tiga hal: (a) pengaturan keamanan dengan operasi yang akurat antara Jepang dengan AS; (b) mempertahankan kemampuan bela dirinya; (c) penggunaan gagasan-gagasan diplomatik; (7) untuk mempertahankan stabilitas kawasan sekitarnya, Jepang telah menyediakan dukungan bagi AS untuk mempertahankan kekuatan militernya, serta memperluas kerja sama ekonomi untuk mempromosikan stabilitas dan pembangunan di negara-negara tetangga; (8) perluasan peranan diplomatik Jepang di Asia Pasifik menimbulkan kekhawatiran negara-negara sekitarnya. Mereka khawatir tentang seberapa jauh peranan diplomatik Jepang bisa diperluas dan apakah akan melibatkan dimensi militer; (9) partisipasi Jepang dalam kegiatan-kegiatan diplomatik menjadi bagian terpenting dalam proses dalam dialog politik untuk memenuhi kewajiban politik Jepang di Asia Pasifik dalam peningkatan keamanan semua pihak di masa yang akan datang; (10) pengaturan keamanan seperti *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE) tidak dapat diterapkan di Asia Pasifik, sebab kondisi geopolitik dan lingkungan strategis Asia Pasifik sangat berbeda dengan Eropa; (11) negara-negara Asia Pasifik adalah membutuhkan stabilitas jangka panjang berdasarkan pada pengaturan kerja sama internasional dan forum-forum dialog yang selama ini sudah ada, yang terutama mengacu pada forum kerja sama ekonomi, seperti ASEAN, ASEAN-PMC, APEC, dan PECC, ataupun upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan di kawasan, misalnya pendekatan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam menyelesaikan masalah Kamboja, serta kerangka kerja sama internasional dalam Dialog Utara-Selatan, Semenanjung Korea Selatan; (12) komunikasi bersama PMC merupakan dasar bagi pembicaraan isu keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik (*Kompas*, 23-7-1991).

Menlu Korea Selatan, Lee Sang Ock, mengatakan bahwa: (1) ASEAN merupakan sarana yang efektif untuk kerja sama di kawasan Asia Tenggara, tidak seperti organisasi-organisasi regional lainnya; (2) dalam lima tahun terakhir ini perdagangan ASEAN-Korea Selatan meningkat rata-rata 30%; (3) dibandingkan dengan tahun 1990, dalam empat bulan pertama tahun 1991 perdagangan ASEAN-Korea Selatan mencapai US\$4 milyar, berarti meningkat sebesar 37%; (4) pada akhir tahun 1991, perdagangan ASEAN-Korea Selatan diha-

rapkan mencapai US\$13 milyar; (5) jumlah investasi Korea Selatan di ASEAN mencapai US\$1 milyar lebih. Terdapat 300 perusahaan Korea Selatan yang menanamkan modalnya di negara ASEAN; (6) sehubungan dengan perubahan-perubahan dunia yang berlangsung begitu cepat, maka kerja sama ASEAN-Korea Selatan perlu terus ditingkatkan (*Antara*, 23-7-1991); (7) faktor penyebaran, heterogenitas, dan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, seringkali menjadi hambatan untuk mencapai kerja sama yang efisien di Asia Pasifik. Tetapi faktor-faktor keragaman (heterogenitas) dapat menjadi aset yang menguntungkan jika ingin membentuk kerja sama di Asia Pasifik yang didasarkan pada keterbukaan dan keluwesan sesuai dengan paham globalisasi; (8) pertumbuhan ekonomi yang memacu perkembangan industri dan urbanisasi menimbulkan masalah lingkungan dan narkotika di negara-negara berkembang (*Kompas*, 23-7-1991).

Sementara itu Menlu Ali Alatas mengatakan sesuai menandatangani protokol amandemen persetujuan RI-Belanda tentang penghapusan pajak berganda yang telah diberlakukan sejak tahun 1973, bahwa: (1) ASEAN bersedia membahas masalah hak asasi manusia dan masalah lingkungan hidup dengan ME. Tetapi ASEAN tidak setuju apabila masalah hak asasi manusia dan masalah lingkungan hidup dijadikan sebagai kondisionalitas baru dalam kerja sama ekonomi atau perdagangan. Dalam komunikasi bersama AMM ke-24 di Kuala Lumpur tanggal 19-20 Juli 1991, para Menlu ASEAN telah menegaskan sikap mereka bahwa masalah hak asasi manusia tidak bisa diterapkan begitu saja dalam hubungan antar negara tanpa memperhatikan kompleksitas kenyataan ekonomi, sosial dan budaya; (2) Indonesia tidak keberatan masalah keamanan dibahas dalam pertemuan ASEAN dengan mitra wicaranya; (3) Indonesia tidak menolak usul Jepang untuk membahas masalah politik setelah pertemuan PMC; (4) Indonesia tidak setuju tentang pembentukan institusi baru seperti SOM ASEAN yang sudah ada, untuk membahas masalah politik dan ekonomi; (5) dalam sidang PMC tercapai persamaan pandangan tentang mulai berfungsinya Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja dan dukungan kepada Pangeran Sihanouk sebagai pemimpin SNC, serta penyelesaian menyeluruh masalah Kamboja yang dapat menjamin stabilitas di Indocina sesuai dengan kerangka Konperensi Paris tentang Kamboja (PCC); (6) ASEAN terbuka bagi negara-negara Indocina (Laos, Vietnam, Kamboja), yang ingin bergabung. Meskipun proses pencapaian perdamaian di Kamboja masih berlangsung, ketiga negara itu dapat

mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan ASEAN melalui Persetujuan Kerja Sama dan Hidup Berdampingan Secara Damai (*ASEAN Treaty of Amity and Cooperation*) (*Antara*, 23-7-1991).

Menlu Kanada, Barbara McDougall, mengatakan bahwa ASEAN adalah organisasi regional yang paling berhasil di Pasifik, dan diharapkan nantinya ASEAN harus mencakup semua negara Asia Tenggara.

Menlu Belanda Hans van Den Broek yang menjabat sebagai Presiden Dewan ME mengatakan bahwa masalah keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik menjadi perhatian ME. Pembangunan ekonomi hanya bisa dilakukan dengan perdamaian, keamanan dan stabilitas. Dia berpendapat bahwa CSCE di masa pasca Perang Dingin berbeda dengan sebelumnya. CSCE membahas masalah ekonomi, keamanan, lingkungan hidup, demokrasi dan sebagainya, dan bukan masalah konflik ideologis. CSCE mempunyai nilai universal.

Sementara itu Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Gareth Evans mengatakan bahwa situasi keamanan di Asia Pasifik sangat kompleks dan selalu berubah-ubah. Dia menolak deskripsi-deskripsi skematis dan jawaban-jawaban menyeluruh mengenai keamanan. Australia mengharapkan AS dan sekutunya tetap hadir di kawasan Asia Pasifik.

Wakil Menlu AS, Robert Zoellick, mengatakan bahwa kehadiran militer, komitmen dan jaminan AS di Asia Pasifik merupakan pengimbang informal dan membentuk struktur keamanan yang efektif selama empat dekade. Kerja sama subregional antara AS dan sekutunya tentang keamanan di Asia berjalan dengan baik (*Kompas*, 23-7-1991).

Dalam sidang yang dilangsungkan 6+7 (enam negara ASEAN dan tujuh negara mitra dialog) masalah EAEG yang diperkirakan akan menjadi isu yang paling kuat, ternyata pihak Malaysia hanya menyebutkan dalam satu bab saja. EAEG merupakan konsep ekonomi yang mampu mempertahankan semangat pembangunan ekonomi kawasan Asia Timur dan menekankan pada sistem perdagangan multilateral (*Kompas*, 23-7-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) ancaman yang dihadapi ASEAN di Asia Pasifik datang dari interaksi antar empat negara besar, yaitu Uni Soviet, AS, Cina dan Jepang. Secara substantif, dinamika keempat negara besar itu merupakan inti persoalan yang dihadapi negara-negara di Asia Pasifik; (2) untuk

menghadapi interaksi keempat negara itu ASEAN harus memperkuat diri; (3) ASEAN perlu mengembangkan kerja sama keamanan secara ASEAN; (4) usul tentang pengaturan keamanan seperti CSCE atau gagasan Pan Asia, tidak dapat diterapkan karena corak perimbangan kekuatan negara-negara Asia-Pasifik lebih beragam; (5) masalah keamanan perlu dibahas untuk meningkatkan saling percaya (*confidence building measure*) melalui kebijakan militer masing-masing negara. Pembangunan pertahanan Jepang untuk mengawasi jalur lautnya merupakan suatu contoh diplomasi perang (*gun boat diplomacy*). Ini kurang efektif untuk mengintegrasikan kepentingan keamanan dengan kepentingan regional. Yang diperlukan adalah memperkuat negara-negara ASEAN dengan bantuan negara-negara besar untuk memiliki kemampuan mengawasi jalur laut dari segala aspek (*Kompas*, 24-7-1991).

Pertemuan ASEAN dengan tujuh negara mitra dialog berakhir dengan perbedaan pendapat mengenai masalah hak asasi manusia di Myanmar.

Para Menlu ASEAN sepakat untuk tidak mengisolasi Myanmar, dan akan mengutus Menlu Filipina, Raul Manglapus, ke negara itu untuk mengundangnya agar menghadiri konferensi informal tentang masalah keamanan Asia Pasifik, bulan November 1991. Dan juga akan membicarakan masalah hak asasi manusia (*Kompas*, 25-7-1991).

Menlu AS, James Baker, mengakui adanya perbedaan pendapat antara ASEAN dengan AS tentang hak asasi manusia. Tetapi ia mengharapkan ASEAN agar tetap menggunakan pengaruhnya, baik secara kolektif maupun sendiri-sendiri, untuk lebih memperhatikan isu hak asasi manusia, pemilu dan tahanan politik di Myanmar.

Sedangkan Menlu Muangthai, Arsa Sarasin, mengatakan bahwa ASEAN telah sepakat untuk melakukan pendekatan secara konstruktif dengan Myanmar guna menciptakan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di ASEAN dan Asia Pasifik (*Kompas*, 25-7-1991).

Dirjen Politik Deplu Wiryono Sastrohandoyo mengatakan kepada pers bahwa: (1) APEC sebagai wahana untuk menjembatani negara ASEAN dan negara-negara Asia Pasifik merupakan forum yang tepat; (2) untuk mewujudkan gagasan pembentukan kelompok-kelompok ekonomi baru di kawasan Asia Pasifik perlu waktu yang cukup lama; (3) forum APEC sudah cukup mapan, tetapi pelaksanaan proyek-proyek dan arah

masa depan APEC masih memerlukan persetujuan dari semua pihak; (4) forum APEC yang saat ini sifatnya konsultatif dapat ditingkatkan menjadi bentuk organisasi, agar lebih efisien dan mekanismenya dapat ditingkatkan; (5) ada harapan dari beberapa negara agar ASEAN dapat menjadi dasar dari APEC. Untuk itu kerja sama intra ASEAN harus jelas bentuknya; (6) negara-negara Asia Pasifik menduduki tingkat kelima sebagai mitra dagang AS (*Kompas*, 25-7-1991).

Presiden Dewan ME Hans van Den Broek mengatakan dalam konperensi pers penutupan sidang PMC bahwa ASEAN dan negara mitra dialognya mengharapkan Putaran Uruguay dan GATT tahun 1991 ini berhasil.

Dalam pada itu Menlu Korea Selatan, Lee Sang Ock, dan Menlu Muangthai, Arsa Sarasin, mengemukakan hal yang sama tentang peranan APEC dalam masalah ekonomi di Asia Pasifik.

Menlu AS James Baker juga mengatakan bahwa APEC merupakan forum penting bagi kerja sama perdagangan dunia, dan AS akan terus bekerja sama dengan negara-negara anggota APEC demi kesuksesan APEC (*Kompas*, 25-7-1991).

Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan bahwa: (1) hubungan ASEAN-Australia semakin meningkat dan kompleks dengan dibentuknya forum ASEAN-Australia yang mempunyai tugas mengidentifikasi kerja sama telekomunikasi, pendidikan, sains dan teknologi serta lingkungan; (2) masih mungkin timbul masalah dalam kerja sama ekonomi, politik dan keamanan antara ASEAN dan Australia; (3) pertumbuhan investasi Australia di ASEAN lambat jika dibandingkan dengan investasi ASEAN di Australia. Investasi ASEAN di Australia berbentuk real estate, pasar uang dan bursa saham, sedangkan investasi Australia di ASEAN dalam bentuk modal ventura teknologi industri, eksplorasi mineral dan manufaktur (*Suara Karya*, 25-7-1991).

Menlu Kanada, Barbara McDougall, mengatakan bahwa: (1) hubungan antara ASEAN dan Kanada perlu ditingkatkan, meskipun hubungan dagang ASEAN-Kanada dalam empat tahun terakhir ini meningkat; (2) total nilai perdagangannya pada tahun 1990 mencapai 3,4 milyar dolar Kanada, meningkat dua kali dari nilai tahun 1986; (3) Kanada merupakan sasaran ekspor barang manufaktur dari negara-negara ASEAN, yang mencapai 70%; (4) melalui Lembaga Pembangunan Internasional Kanada, pemerintah Kanada setiap tahun

menyediakan dana sebesar 7 milyar dolar Kanada lebih, bagi perusahaan-perusahaannya yang melakukan investasi di negara-negara ASEAN; (5) perluasan liberalisasi perdagangan di Amerika Utara tidak akan mempengaruhi akses ASEAN ke pasar Amerika, tetapi justru bermanfaat bagi semua pemasok, khususnya produsen dari ASEAN yang telah melakukan penetrasi ke pasar Kanada; (6) pihaknya telah melakukan pengamatan mengenai kemungkinan akibat negatif dari persetujuan perdagangan bebas Kanada-AS terhadap hubungan dagang ASEAN-Kanada; (7) Kanada mendukung struktur APEC yang fleksibel dan konsultatif (*Kompas*, 25-7-1991).

B. HUBUNGAN ASEAN-VIETNAM

Siaran Radio Hanoi tanggal 24 Juli 1991 mengatakan: (1) Vietnam menyambut baik usaha-usaha ASEAN untuk menyelesaikan konflik Kamboja, tetapi organisasi non-komunis itu sendiri sedang menghadapi ancaman-ancaman serius ketidakmantapan di bidang politik dan ekonomi; (2) Konferensi Tingkat Menteri ASEAN yang diadakan di Kuala Lumpur tanggal 19-22 Juli 1991, merupakan petunjuk jelas bahwa ASEAN berniat memperkuat peranan dan posisinya di Asia, tidak terbatas di bidang ekonomi saja; (3) Vietnam memuji ASEAN karena dalam pertemuan tingkat menteri tersebut mengundang wakil-wakil dari Uni Soviet dan RRC; (4) ASEAN tidak dapat mengabaikan potensi-potensi dan pengaruh Uni Soviet dan Cina di kawasannya; (5) Vietnam memuji usaha-usaha ASEAN untuk menyelesaikan konflik Kamboja, meskipun ASEAN mengecam Vietnam karena mencetuskan perang dengan serbuannya tahun 1987; (6) pergolakan-pergolakan yang dihadapi negara-negara ASEAN masih mengancam kemantapan negara-negara ASEAN (*Antara*, 25-7-1991).

C. HUBUNGAN ASEAN-LAOS

Wakil Menlu Laos, Soulivong Phrasithideth, mengatakan di Vientiane tanggal 11 Agustus 1991 bahwa: (1) Laos akan mempertimbangkan usul ASEAN untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara Indocina, tetapi Laos juga meragukan, apakah semua negara ASEAN ingin bekerja sama dengan pihaknya; (2) Laos telah meminta untuk menjadi anggota perjanjian yang mendasari berdirinya ASEAN; (3) hubungan Laos dengan ASEAN tidak akan memperburuk hubungan-

nya dengan Kamboja dan Vietnam; (4) Muangthai telah meningkatkan hubungannya dengan Laos, Kamboja dan Vietnam; (5) meskipun hubungan Laos dengan Muangthai berjalan baik, tetapi masih ada halangan yakni masalah perbatasan, hubungan dagang dan isu-isu pengungsi di kamp-kamp penampungan; (6) ia puas dengan hasil perundingan antara faksi-faksi Kamboja yang diadakan pada bulan Juni-Juli 1991 di Muangthai dan Cina (*Kompas*, 12-8-1991).

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

A. SIDANG DEWAN NASIONAL TERTINGGI (SNC)

Sidang Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja yang juga dihadiri oleh Ketua Bersama PICC dan Wakil PBB berlangsung di Muangthai tanggal 24-26 Juni 1991 untuk membahas masalah penunjukkan Ketua SNC dan Wakilnya, masalah gencatan senjata, dan penghentian pemasokan senjata.

Pangeran Sihanouk mengatakan: (1) keempat kelompok Kamboja yang saling berperang berjanji akan melaksanakan gencatan senjata mulai tanggal 23 Juni 1991, dan sepakat untuk mendirikan markas besar SNC di Phnom Penh; (2) dua pemerintahan yang saling bersaing yaitu CGDK dan Pemerintahan Negara Kamboja di Phnom Penh, akan tetap ada sampai pemilu diselenggarakan; (3) SNC yang mewakili kedaulatan Kamboja akan mulai menerima surat-surat kepercayaan dari para perwakilan asing dan kedutaan besarnya akan berada di Phnom Penh; (4) masalah kepemimpinan SNC adalah masalah yang sulit (*Antara*, 24-6-1991); (5) ia mengusulkan adanya sekjen untuk memecahkan masalah kepemimpinan dalam SNC, dan lima diktum agar SNC segera berfungsi, serta tercipta penyelesaian masalah Kamboja. Kelima diktum tersebut adalah: (a) karena penyelesaian masalah ketua dan wakil ketua SNC belum dapat dicapai, maka diusulkan agar SNC menjadi *collegial presidency* yang berdaulat dan juga menjadi *United Cambodia*; (b) agar SNC berfungsi maka harus menduduki kursi Kamboja di PBB, di Badan Internasional, di Konferensi Gerakan Non-Blok dan di forum-forum lainnya; (c) rencana perdamaian usulan lima anggota tetap DK-PBB akan dikaji dan diterapkan melalui konsensus yang dicapai SNC; (d) perlunya lokasi markas besar SNC di Phnom Penh; (e) kedaulatan besar yang diakreditasi SNC akan dibuka di lokasi markas besar SNC (*Kompas*, 24-6-1991).

Julio Jeldres, Kepala Sekretariat Kantor Sihanouk, mengatakan bahwa Hun Sen: (1) setuju tentang usulan Sihanouk mengenai sekjen dengan syarat bahwa Hun Sen harus sebagai Deputi Sekjen berdasarkan kesepakatan pertemuan lanjutan kedua PICC dengan SNC di Jakarta tanggal 2-4 Juni 1991; (2) setuju tentang akreditasi duta besar dan gencatan senjata asal dikaitkan dengan penghentian pemasokan senjata dari luar negeri. Sedangkan mengenai bendera dan lagu kebangsaan keputusannya harus disetujui parlemen; (3) mengusulkan perlunya konsensus dua pertiga suara SNC yang anggotanya berjumlah 12 orang. Di samping itu, sidang SNC sekarang ini bersifat konsultatif sehingga tidak ada agenda yang tetap (*Kompas*, 24-6-1991).

Sementara itu PM Kamboja Hun Sen mengatakan bahwa: (1) Phnom Penh menerima peranan PBB untuk mengawasi gencatan senjata guna mengakhiri perang saudara Kamboja yang telah berlangsung selama 12 tahun; (2) dia setuju mengenai rencana lima anggota tetap DK-PBB yang bertugas mengawasi pemerintah baru (*Antara*, 25-6-1991).

Sidang hari pertama SNC menyetujui empat keputusan yang disepakati oleh semua faksi yang bertikal, yakni: (1) gencatan senjata mulai berlaku tanggal 24 Juni 1991 tanpa batas waktu dan menghentikan penerimaan bantuan militer dari luar negeri; (2) Sihanouk akan memimpin delegasi yang menduduki kursi Kamboja dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1991; (3) Sihanouk ditunjuk sebagai pemimpin sidang SNC; (4) bentuk bendera dan lagu kebangsaan Kamboja yang baru akan diterima setelah pemilu (*Kompas*, 25-6-1991).

Komunike akhir pertemuan SNC yang dibacakan oleh Pangeran Sihanouk mengatakan bahwa: (1) Sihanouk diberi tugas untuk memimpin sidang-sidang SNC Kamboja di masa-masa yang akan datang; (2) mereka menerima bendera dan lagu Kamboja seperti yang diusulkan oleh Sihanouk tanggal 22 Juni 1991. Bendera berwarna biru muda, seperti bendera PBB dengan silhouete wilayah Kamboja berwarna putih dan ditengahnya bertuliskan "Kampuchea" dalam bahasa Khmer. Sihanouk diminta menulis surat ke Sekjen PBB untuk memberitahukan bendera dan lagu SNC Kamboja; (3) gencatan senjata dan moratorium bantuan militer dari luar negeri diterapkan mulai tanggal 24 Juni 1991. Cara pengawasan PBB akan dirundingkan dalam sidang selanjutnya; (4) delegasi SNC yang dipimpin Sihanouk akan dikirim ke sidang Majelis Umum PBB, bulan September 1991; (5) Sihanouk diperintahkan menulis

permintaan, atas nama SNC kepada Sekjen PBB agar memasukkan candi Angkor Wat ke dalam daftar UNESCO tentang warisan peradaban dunia; meminta badan eksekutif Komite Mekong menerima Kamboja sebagai anggota Komite Mekong; meminta Bank Dunia dan IMF agar delegasi SNC dapat menghadiri sidang kedua lembaga keuangan tersebut di Bangkok pada bulan Oktober 1991; meminta Sekjen PBB memberikan bantuan kemanusiaan dan latihan ketrampilan untuk rakyat Kamboja; (6) mereka sepakat untuk membentuk sekretariat SNC dan markas besar SNC di Phnom Penh dengan fasilitas dan jaminan sebagai berikut; (a) anggota SNC dari setiap faksi memiliki kediaman di Phnom Penh yang dilindungi pasukan faksinya. Pasukan SNC menjamin keamanan di kompleks kediaman anggota SNC dan pasukan faksi Phnom Penh menjamin keamanan dari luar kompleks; (b) perwakilan PICC memiliki misi permanen yang diakui SNC, perwakilan khusus Sekjen PBB atau wakilnya memiliki misi permanen di SNC, perwakilan negara-negara yang berpartisipasi dalam PICC, atau wakil lima anggota tetap DK-PBB, dan juga wakil negara-negara ASEAN, memiliki misi yang diakui SNC; (7) sambil menunggu pembangunan markas SNC di Phnom Penh, sidang SNC berikutnya akan dilangsungkan di bekas Kedutaan Besar Kamboja di Bangkok; (8) suatu kelompok kerja akan dibentuk mempelajari prosedur kerja SNC, peraturan pemilu dan prinsip-prinsip konstitusi baru Kamboja (*Kompas*, 27-6-1991).

Sementara itu pada pertemuan informal SNC, PECC dan utusan khusus Sekjen PBB, tanggal 27 Juni 1991 tidak dikeluarkan suatu keputusan.

B. PERTEMUAN INFORMAL ANGGOTA DEWAN NASIONAL TERTINGGI (SNC)

Pertemuan informal SNC berlangsung di Beijing tanggal 16-17 Juli 1991 dihadiri oleh 9 dari 12 anggota SNC, anggota tetap DK-PBB, Ketua Bersama PICC dan Wakil Menlu RRC, Xu Dunxin, untuk membahas perjanjian-perjanjian akhir tentang rencana pengiriman delegasi SNC ke Sidang Majelis Umum PBB bulan September 1991 dan pendirian markas besar SNC di Phnom Penh, November 1991.

Pangeran Sihanouk mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) meskipun anggota SNC tidak dapat hadir seluruhnya, tetapi tidak berarti bahwa mereka yang tidak hadir tidak dapat mencari kompromi

penyelesaian masalah-masalah; (2) sejauh pelaksanaannya mengutamakan proses perdamaian, ia memberi kesempatan kepada anggota SNC untuk mendiskusikannya; (3) sebagai Ketua SNC, ia tetap netral dan tidak memihak (*Kompas*, 17-7-1991).

Sementara itu Pangeran Norodom Ranaridh mengatakan kepada para diplomat asing bahwa ada lima kesempatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut, yaitu: (1) SNC akan mengirimkan surat kepada Sekjen PBB agar PBB mengirim tim yang akan mengevaluasi dan mengawasi gencatan senjata dan penghentian bantuan senjata dari luar negeri; (2) delegasi untuk Komite Mekong akan segera dibentuk dan akan bertemu pada bulan Agustus dan November 1991, tanpa menyebutkan di mana pertemuan akan berlangsung. Delegasi ini akan terdiri dari satu wakil untuk setiap faksi. Komite Mekong adalah sebuah tim yang dibentuk tahun 1970-an, terdiri dari empat negara Indocina (Laos, Kamboja, Vietnam dan Muangthai) untuk melaksanakan kerja sama guna mengatur penggunaan Sungai Mekong. Komite ini kemudian tidak berfungsi karena meletusnya perang Kamboja; (3) komposisi Sekretariat SNC akan segera diumumkan. Sekretariat SNC akan mulai beroperasi seminggu sebelum berlangsungnya sidang SNC di Bangkok bulan Agustus 1991. Sekretariat SNC terdiri dari enam orang dengan pembagian masing-masing tiga dari rezim Phnom Penh dan tiga lainnya dari faksi pertawanan Kamboja; (4) mereka sepakat agar kelompok kerja SNC segera berfungsi untuk merumuskan prosedur sidang-sidang SNC. Prioritas utama kelompok kerja SNC adalah merumuskan aturan main sidang SNC. Kemudian setelah itu, kelompok kerja SNC yang terbentuk akan menyusun rancangan konstitusi dan prosedur pemilu; (5) modalitas bagi perwakilan tetap asing di Kamboja perlu diatur untuk menentukan tempat perwakilan tetap (*Kompas*, 17-7-1991).

Komunike akhir dari pertemuan informal itu yang dibacakan oleh Pangeran Sihanouk mengatakan: (1) Pangeran Sihanouk terpilih sebagai Presiden SNC; (2) untuk menjalankan fungsi Presiden SNC, dia akan melepaskan seluruh jabatan resminya sebagai pemimpin faksi perlawanan Kamboja dan Pemerintahan Nasional Kamboja; (3) masalah Wakil Presiden SNC tidak disinggung dalam pertemuan itu, (*Kompas*, 18-7-1991).

Pada pertemuan informal SNC di Jakarta tanggal 2-4 Juni 1991 telah terjadi kesepakatan tentang Sihanouk sebagai Ketua SNC dan Hun Sen sebagai Wakil Ketuanya. Namun kesepakatan di antara ke-

duanya ditolak oleh anggota SNC lainnya, terutama dari pihak Khmer Merah yang diwakili oleh Khieu Sampan. Mereka menolak Hun Sen menjadi satu-satunya Wakil Ketua SNC.

Sementara itu bersamaan dengan terpilihnya Sihanouk sebagai Presiden SNC, lima anggota tetap DK-PBB juga mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua PICC dan tuan rumah RRC yang dipimpin oleh Wakil Menlu Xu Dunxin (*Kompas*, 18-7-1991).

Jusuf Wanandi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan di Jakarta tanggal 20 Juli 1991 bahwa: (1) ada faktor baru dalam upaya mencari penyelesaian politik tentang konflik Kamboja, yaitu adanya keinginan Pangeran Sihanouk untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan Hun Sen melalui cara apapun. Keinginan Sihanouk yang didukung oleh Cina, akan sangat membantu proses penyelesaian masalah Kamboja; (2) perubahan sikap Sihanouk yang memihak Hun Sen, dan mulai meninggalkan Khmer Merah mempunyai arti yang sangat penting bagi penyelesaian masalah Kamboja; (3) keadaan di Kamboja sekarang ini tidak lagi membuat ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara, sebab aktor-aktor eksternalnya, yaitu RRC dan Vietnam, sudah melepaskan diri dari pertikaian bangsa Kamboja; (4) persoalannya sekarang adalah bagaimana mencari cara untuk mendekatkan faksi-faksi yang sedang bersengketa di sana; (5) meskipun tidak dinyatakan secara terbuka, dukungan RRC terhadap sikap Sihanouk merupakan faktor penting; (6) dengan kehadiran Hun Sen di Beijing membawa akibat perubahan sikap RRC, yang selama ini dikenal pro Khmer Merah; (7) bentuk penyelesaian masalah Kamboja sekarang ini, sangat menguntungkan pihak Hun Sen. Sebab dengan Sihanouk memilih Hun Sen, pertarungan di antara keduanya sudah berakhir. Sebelumnya Sihanouk dalam kedudukannya sebagai pemimpin CGDK selalu menolak kompromi dan kerja sama dengan pihak Phnom Penh yang dianggap sebagai boneka Vietnam (*Kompas*, 20-7-1991).

Sementara itu Hasnan Habib, mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, mengatakan bahwa: (1) upaya pertemuan informal SNC di Beijing itu merupakan permainan politik internasional. Upaya tersebut merupakan *take and give* antara Sihanouk dengan RRC; (2) pertemuan informal tersebut yang hanya memilih Presiden SNC dan tidak menetapkan wakilnya, akan mengakibatkan SNC tidak mempunyai arti apabila Sihanouk secara kebetulan tidak berada di tempat atau sakit; (3) ada dua hal yang dapat mempercepat penyelesaian

masalah Kamboja, yaitu: (a) kesediaan Muangthai untuk melarang wilayahnya digunakan sebagai tempat penyaluran bantuan RRC kepada kelompok perlawanan Kamboja. Vietnam juga bersedia menghentikan bantuan kepada Phnom Penh, termasuk bantuan militer; (b) urusan dalam negeri Kamboja diselesaikan oleh orang Kamboja sendiri, yaitu antara kelompok Hun Sen, Khmer Merah dan Son Sann (*Kompas*, 20-7-1991).

C. SIDANG DEWAN NASIONAL TERTINGGI

Sidang SNC sebagai kelanjutan dari pertemuan informal di Beijing tanggal 16-17 Juli 1991, berlangsung di Pattaya, Muangthai tanggal 26-29 Agustus 1991.

Pada hari pertama, sidang SNC menemui jalan buntu kembali. Wakil-wakil pemerintah Phnom Penh telah bertahan pada sikapnya yang menolak pembubaran seluruh kekuatan bersenjata, kecuali terbatas hanya 40% dari kekuatan yang ada. Namun ada beberapa kemajuan penting dalam pertemuan tersebut, yaitu: (1) dicapainya kesepakatan gencatan senjata; (2) semua anggota SNC setuju agar Sihanouk mengirim surat kepada Sekjen PBB untuk minta badan dunia tersebut segera mengirim pasukan pengawas gencatan senjata; (3) PBB diminta mengawasi penghentian semua suplai senjata dari luar (*Kompas*, 27-8-1991).

Pemimpin KPNLF Son Sann mengatakan para anggota SNC harus menerima usul perdamaian yang disponsori oleh 5 anggota tetap DK-PBB. Jika anggota SNC tidak bersedia menerima usul tersebut, maka kelima negara anggota DK-PBB akan berpaling pada persoalan yang jauh lebih penting yang menyangkut tatanan dunia, seperti Timur Tengah, Eropa Timur dan Afrika.

Pemimpin Khmer Merah Khieu Samphan mengatakan: (1) dengan menerima usul PBB, maka perdamaian di Kamboja akan terwujud, dan masing-masing pihak tidak akan saling berperang; (2) keuntungan lain apabila menerima usul PBB adalah pembiayaan personil dalam pasukan pengawas keamanan ditanggung PBB; (3) negara-negara anggota DK-PBB akan membantu membiayai proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Kamboja (*Kompas*, 27-8-1991).

Demobilisasi kekuatan bersenjata faksi-faksi merupakan salah satu tawaran yang diajukan oleh PBB bagi perdamaian Kamboja. Badan dunia ini menghendaki seluruh kekuatan bersenjata yang ada di Kamboja harus dibubarkan. Senjata dan peralatan militer harus digudangkan di bawah pengawasan PBB.

Hun Sen yang selama ini menolak usul PBB itu kini mulai berubah sikapnya. Dia menawarkan 40% angkatan bersenjata yang didemobilisasi. Sementara itu tiga faksi yang bergabung dalam CGDK setuju dengan usul PBB.

Sihanouk mengatakan bahwa masalah pelaksanaan demobilisasi belum dapat ditentukan waktunya karena masih menunggu reaksi dari anggota tetap DK-PBB, khususnya AS.

Pemimpin Khmer Merah Khieu Samphan mengatakan bahwa pelaksanaan masalah gencatan senjata akan mengalami kesulitan, karena terdapat unit-unit gerilya yang tergabung dalam milisi, tetapi hidup dan tinggalnya bersama rakyat. Mereka bukan merupakan kekuatan reguler seperti yang dikategorikan dalam pengertian angkatan bersenjata. Khieu Samphan mengusulkan agar hitungan yang dilakukan bukan berdasarkan persentase, melainkan jumlah personil. Jumlah kekuatan bersenjata yang ditawarkan adalah 6.000 personil bagi pemerintah Phnom Penh dan 6.000 lainnya bagi kelompok perlawanan yang tergabung dalam 3 faksi (*Kompas*, 28-8-1991).

Sementara itu PM Hun Sen menghendaki agar pasukan khusus A-3 tetap bertahan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian saja. Sebaliknya, pemimpin Khmer Merah, Khieu Samphan menghendaki agar pasukan khusus A-3 Pemerintah Phnom Penh dimasukkan sebagai kekuatan bersenjata.

Dalam usahanya memecahkan masalah Kamboja, DK-PBB mengusulkan agar semua kekuatan bersenjata di Kamboja dibubarkan. Untuk sementara kekuasaan akan diserahkan kepada UNCTAD (kekuasaan transisional PBB di Kamboja) hingga pemilu diselenggarakan dan terbentuk pemerintahan baru.

Setelah beberapa kali berunding dan menemukan jalan buntu, akhirnya dicapai kesepakatan untuk membubarkan 70% dari seluruh kekuatan bersenjata masing-masing faksi Kamboja.

Pernyataan bersama yang dibacakan oleh Pangeran Norodom Sihanouk menyebutkan bahwa: (1) sidang SNC berhasil mencapai kompromi mengenai demobilisasi kekuatan bersenjata masing-masing faksi Kamboja. Kompromi ini merupakan kunci perdamaian Kamboja yang telah mengalami peperangan selama 12 tahun; (2) empat faksi Kamboja telah sepakat untuk mengurangi jumlah pasukannya hingga 70%; (3) SNC menghimbau agar PBB segera mengirim kontingen bagi pengawasan

keamanan dan perlucutan senjata; (4) SNC akan memberi saran-saran bagi UNCTAD mengenai pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Jika ada isu yang sulit dikompromikan di antara anggota SNC, Sihanouk diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan (*Kompas*, 28-8-1991).

Pangeran Sihanouk mengatakan bahwa: (1) meskipun telah dicapai kompromi, kontingen PBB belum dapat segera dikirim sebelum usul-usul baru itu disetujui AS dan Inggris, sebagai anggota tetap DK-PBB; (2) tiga dari lima anggota DK-PBB yaitu Perancis, RRC dan Uni Soviet setuju dengan usulan baru SNC (*Kompas*, 29-8-1991).

Sidang SNC berakhir tanpa kesepakatan mengenai soal sistem pemilu. Namun ada beberapa kemajuan penting, yaitu: (1) pemerintah Khmer Merah yang semula menarik isu genocide dalam kerangka perdamaian usulan PBB, meminta agar dimasukkan; (2) pemerintah Phnom Penh bersedia menarik usul tentang hak asasi manusia yang dianggap mendiskreditkan Khmer Merah; (3) pasukan khusus A-3 di Phnom Penh tetap dipertahankan sebagai elemen kepolisian; (4) sidang SNC berikutnya direncanakan berlangsung di Muangthai tanggal 21-23 Oktober 1991 (*Kompas*, 30-8-1991).

Dalam jumpa pers PM Hun Sen mengatakan: (1) usul Khmer Merah tentang polisi yang tidak boleh membawa senjata tidak masuk akal; (2) sistem pemilu berdasarkan mayoritas tunggal telah dianut sejak Kamboja merdeka, dan terbukti sangat demokratis (*Kompas*, 30-8-1991).

Walaupun 4 faksi dalam SNC belum mencapai kompromi mengenai sistem pemilu yang akan diterapkan di Kamboja, namun wakil-wakil anggota DK-PBB setuju untuk dirundingkan secara bertahap.

Sementara itu pembantu Menlu AS, Richard Solomon, mengatakan bahwa pemerintah AS: (1) menyambut baik tercapainya kompromi di antara faksi-faksi yang bertikai di Kamboja; (2) tetap berpegang pada penyelesaian menyeluruh di Kamboja berdasarkan rancangan yang diajukan DK-PBB; (3) harus mempelajari hasil pertemuan SNC sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak hasil kompromi, khususnya mengenai demobilisasi; (4) memberi bantuan darurat US\$50.000 bagi korban bencana alam di Kamboja (*Kompas*, 29-8-1991). Selanjutnya pembantu Menlu AS itu mengatakan bahwa akan memulihkan hubungan dengan Vietnam setelah kerangka perdamaian PBB

ditandatangani di Paris pada bulan Oktober 1991 mendatang. Pemulihan hubungan itu akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan hubungan perdagangan dan kemudian dilanjutkan dengan hubungan diplomatik (*Kompas*, 31-8-1991).

VII. LOKAKARYA PENGELOLAAN POTENSI LAUT CINA SELATAN

Lokakarya Pengelolaan Potensi Laut Cina Selatan berlangsung di Bandung tanggal 15-18 Juli 1991 dihadiri oleh wakil-wakil dari ASEAN, Vietnam, Laos, Cina dan Taiwan untuk mencari cara-cara guna mengubah wilayah potensial konflik yang menjadi arena klaim tumpang tindih menjadi suatu daerah kerja sama.

Menlu Ali Alatas mengatakan pada pembukaan lokakarya bahwa: (1) lokakarya pengelolaan potensi Laut Cina Selatan bukan berarti suatu forum perundingan yang difokuskan pada sebagian atau semua tuntutan kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara di kawasan tersebut; (2) maksud lokakarya adalah untuk menemukan cara-cara menransformasikan sumber-sumber konflik potensial kepada bentuk-bentuk konstruktif bagi kerja sama dan keuntungan bersama; (3) pembicaraan dan diskusi tentang masalah-masalah yang terdapat di Laut Cina Selatan, seperti pengelolaan sumber-sumber maritim, keselamatan navigasi, perlindungan terhadap lingkungan termasuk penanganan pencemaran laut dan penelitian ilmiah akan banyak bermanfaat bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik itu, termasuk negara-negara yang secara tidak langsung mempunyai tuntutan terhadap wilayah tersebut; (4) dengan posisi netralnya, Indonesia memprakarsai pertemuan negara-negara yang mempunyai tuntutan yang tumpang tindih di kawasan itu; (5) lokakarya itu merupakan kelanjutan dari pertemuan serupa di Bali bulan Januari 1990, yang hanya dihadiri oleh negara-negara ASEAN (*Suara Pembaruan*, 15-7-1991); (6) pengaturan kerja sama itu dapat dilakukan tanpa harus menunggu penyelesaian isu politik, keamanan, teritorial dan yurisdiksi; (7) perubahan pola hubungan antar negara, khususnya antar kekuatan dunia, akan menciptakan lingkungan strategis global baru. Di samping itu perubahan tersebut juga berpengaruh atas konstelasi geopolitis dan ekonomi Asia Pasifik; (8) perubahan yang terjadi di Eropa berupa proses akomodasi dan integrasi karena kondisi yang berbeda, tidak dapat diterapkan di Asia Pasifik dan tidak mengurangi upaya untuk mulai meletakkan dasar bagi hubungan yang damai dan lebih stabil bagi lingkungan strategis baru;

(9) penyelesaian konflik di Kamboja dan di Semenanjung Korea perlu menjadi prioritas; (10) konsultasi dan kerja sama antar negara mengenai isu-isu penting yang menjadi perhatian semua negara perlu dikembangkan untuk membangun saling kepercayaan, misalnya tentang Laut Cina Selatan (*Kompas*, 16-7-1991).

Hasjim Djalal, salah satu ketua sidang mengatakan: (1) ada enam masalah yang diidentifikasi pada lokakarya: (a) kerja sama keamanan pelayaran; (b) kemungkinan kerja sama di bidang lingkungan; (c) bagaimana mengatur kekayaan alam di dasar laut seperti migas; (d) isu yang berhubungan dengan yurisdiksi nasional meliputi klaim teritorial, kedaulatan atas pulau, klaim batas-batas yurisdiksi teritorial, zona ekonomi dan landas kontinen; (e) masalah yang berhubungan dengan politik dan keamanan, seperti misalnya bagaimana melihat hubungan Asia Tenggara dengan kawasan lainnya; (f) isu yang berkaitan dengan lembaga kerja sama, seperti misalnya syarat-syarat untuk memajukan kerja sama; (2) tujuan lokakarya bukan untuk mencari penyelesaian masalah klaim teritorial; (3) jika ada klaim yang bertentangan agar diselesaikan secara damai; (4) jika tidak dapat dicapai kesamaan mengenai perbatasan negara, maka dapat ditempuh secara *joint development*, misalnya kerja sama seperti Timor Gap; (5) kerja sama dalam bentuk apapun harus memperhatikan masalah lingkungan (*Kompas*, 16-7-1991).

Prof. Ian Townsend Gault, Direktur Center for Asian Legal Studies University of British-Columbia, Vancouver, Kanada, mengatakan: (1) kerja sama antar negara di perbatasan Laut Cina Selatan merupakan hal yang penting untuk mengatasi perselisihan di antara negara-negara yang berkepentingan; (2) masalah yang penting adalah pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Laut Cina Selatan, dan bukan masalah tentang pemilikan wilayah masing-masing negara (*Kompas*, 16-7-1991); (3) pihaknya telah memberi bantuan US\$250 ribu untuk penyelenggaraan lokakarya tentang Laut Cina Selatan dan akan ditambah dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya (*Pelita*, 16-7-1991).

Lee Lai Toi dari Institute of International Affairs Singapura, mengatakan: (1) periode pasca Perang Dingin perlu mendapat perhatian; (2) setelah era Perang Dingin berakhir muncul isu masalah keamanan di Asia. Pengaruh AS dan Uni Soviet mulai berkurang, sedangkan Jepang berperan lebih aktif; (3) Cina akan berperan lebih aktif dalam masalah Laut Cina Selatan; (4) kehadiran AS di Asia perlu terus dilanjutkan; (5) isu kedaulatan merupakan isu yang sangat sulit untuk disele-

saikan; (6) masih ada kesempatan untuk melakukan kerja sama sains, teknologi, riset dan pelayaran bagi negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan; (7) Cina dan Vietnam memegang posisi kunci dalam penyelesaian masalah di Laut Cina Selatan (*Kompas*, 17-7-1991).

Tang Cheng Yuan, Deputy Direktur Departemen Perjanjian dan Hukum Kemlu Cina, mengatakan: (1) pemerintah Cina setuju diadakannya berbagai kerja sama di Laut Cina Selatan, seperti misalnya perlindungan lingkungan dan pencegahan pembajakan; (2) isu kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan sulit untuk diselesaikan; (3) kerja sama dalam bentuk pertukaran pikiran merupakan langkah yang baik untuk perundingan lebih lanjut; (4) AS dan Uni Soviet belum tentu meninggalkan Laut Cina Selatan, karena wilayah ini bagi dua negara adikuasa itu sangat penting dan strategis (*Kompas*, 17-7-1991).

C.P.F. Luhulima mengatakan: (1) lokakarya mengenai Laut Cina Selatan sekarang ini baru pada tahap pengumpulan dari berbagai usulan dan masalah, belum menentukan bagaimana kerja sama yang akan diadakan pada pertemuan selanjutnya; (2) terdapat usul tentang perlunya dibentuk suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan; (3) masalah Laut Cina Selatan jangan menjadi konflik baru setelah masalah Kamboja selesai (*Kompas*, 17-7-1991).

Hasjim Djalal mengatakan: (1) tiga macam kerja sama di Laut Cina Selatan telah diusulkan sebagai tindak lanjut dari lokakarya itu, yakni: (a) membentuk Dewan Konsultasi Maritim Laut Cina Selatan (*Maritime Consultative Council for the South China Sea - MCCSCS*); (b) membuat program konkrit yang dilakukan oleh semua negara di sekitar Laut Cina Selatan; (c) melanjutkan lokakarya tentang Laut Cina Selatan; (2) beberapa usul lain yang muncul dalam lokakarya mengarah pada rekomendasi pembentukan lembaga atau mekanisme penanganan berbagai masalah di Laut Cina Selatan (*Kompas*, 18-7-1991).

B.A. Hamzah, anggota Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia, mengatakan: (1) tujuan pembentukan MCCSCS antara lain untuk saling tukar pikiran, meningkatkan saling pengertian, mengantisipasi masalah dengan mendeteksi isu yang dapat meningkatkan ketegangan, dan melembagakan pengaturan sementara semua masalah di Laut Cina Selatan; (2) MCCSCS adalah semacam organisasi non pemerintah (NGO) negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan, yang terdiri dari para pejabat pemerintah dan

orang-orang swasta. Lembaga ini berfungsi menemukan konsensus, bersifat pragmatis, berorientasi pada kebijaksanaan (*policy oriented*)¹ dan antisipatoris; (3) MCCSCS melakukan kerja sama dengan ASEAN, IMO (*International Maritime Organization*) dan PBB; (4) struktur MCCSCS terdiri dari sidang umum setiap dua tahun dengan sistem rotasi, komite tetap, kelompok koordinasi, dan gugus tugas (*task force*) yang terdiri dari para ahli MCCSCS; (5) gugus tugas yang penting adalah gugus tugas lingkungan ekologis dan riset ilmiah, gugus tugas navigasi, komunikasi, soal pembajakan dan pelayaran serta gugus tugas pengaturan sumber daya alam; (6) ia mengusulkan pembentukan gugus tugas yang menangani isu seperti keamanan, politik, teritorial dan yurisdiksi (*Kompas*, 18-7-1991).

Juwono Sudarsono mengatakan: (1) ia mengusulkan agar dibentuk kelompok kerja (*working group*) antar negara ASEAN dan kelompok kerja Cina dan Vietnam; (2) kelompok kerja intra ASEAN akan membicarakan masalah Laut Cina Selatan di antara negara anggota ASEAN, terutama Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina; (3) setelah kelompok kerja ASEAN dan Cina-Vietnam berjalan, maka secara periodik kedua kelompok ini mengadakan pertemuan-pertemuan; (4) negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan tidak cukup kuat untuk melakukan kerja sama pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut sebab kemampuan ekonomi dan teknis tidak memiliki; (5) perlu dilibatkan perusahaan-perusahaan swasta dari negara-negara maju untuk pengelolaan di daerah itu; (6) negara-negara di

sekitar Laut Cina Selatan agar meningkatkan kemampuannya di bidang pengelolaan laut, sehingga tidak selalu tergantung pada perusahaan asing (*Pelita*, 18-7-1991).

Kesepakatan bersama mengatakan: (1) setiap sengketa wilayah dan yurisdiksi di Laut Cina Selatan hendaknya diselesaikan dengan cara damai melalui dialog dan perundingan, serta menghindarkan penggunaan kekerasan atau kekuatan militer; (2) pihak-pihak yang terlibat dalam masalah daerah sekitar Laut Cina Selatan agar mengekang diri untuk tidak mempersulit keadaan; (3) di daerah-daerah yang diklaim oleh beberapa negara agar diusahakan kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk pertukaran informasi dan pembangunan bersama (*joint development*); (4) pemerintah masing-masing akan diberikan rekomendasi tanpa prasangka terhadap klaim wilayah dan yurisdiksi untuk menjajagi bidang-bidang kerja sama di Laut Cina Selatan. Bidang-bidang kerja sama itu ialah langkah-langkah untuk menciptakan navigasi dan komunikasi, peningkatan usaha memerangi bajak laut dan perampokan bersenjata serta peningkatan usaha pencarian dan penyelamatan (SAR); (5) diperlukan usaha untuk meningkatkan penggunaan sumber daya hidup, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, riset ilmiah kelautan dan penghapusan pengedaran narkotika di Laut Cina Selatan; (6) lokakarya semacam ini hendaknya diteruskan, dan meminta Indonesia untuk melanjutkan prakarsa tersebut (*Antara*, 18-7-1991).

Timbangan Buku

Katalisator Pembangunan Nasional

Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra, oleh Thomas M. Lillesand dan Ralph W. Kiefer (terjemahan), UGM Press, 1990, XV + 709 + 16 lampiran.

MESKIPUN kedua penulis sepakat, bahwa *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra* merupakan buku permulaan untuk pengenalan penginderaan jauh, tetapi isi buku ini cukup padat dan penjelasannya akurat. Bagi pembaca yang paham teknologi penginderaan karena hidup kesehariannya bersentuhan langsung dengan teknologi tersebut, terbitnya buku ini tentu sangat menggembirakan. Tetapi bagi pembaca dengan latarbelakang ilmu sosial dan humaniora, buku ini memberikan kejutan tersendiri. Para ilmuwan sosial jika membaca buku ini, mungkin semakin menyadari kebenaran dari ampuhnya pendekatan multidisipliner. Dalam konteks ini pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dapat membantu mempermudah pemecahan masalah-masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat dan pemerintah, seperti masalah

tanah, tata kota dan sebagainya.

Bagi mereka dengan latar pengetahuan bukan teknik, buku ini menuntut konsentrasi tersendiri. Banyak istilah teknis yang harus diraba artinya, meskipun istilah tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Istilah *Overlap* oleh penerjemah dipadankan dengan "tampalan", *Range* diterjemahkan dengan "julis", *Supervised* dengan "terselia", tetap merupakan istilah yang sulit dipahami awam. Selain itu, penyunting juga menambah jumlah istilah sulit tersebut yang dikutip dari Profesor Johannes, seperti *Attenuation* menjadi "pelaifan", *Permeable* menjadi "telap" dan sebagainya. Usaha maksimal dari penerjemah dan penyunting dalam mencari padanan istilah-istilah teknis tersebut -- meskipun tetap harus dihargai -- tetapi hanya membawa sedikit manfaat bagi pemahaman pembaca. Istilah teknis dalam bahasa Indonesia ternyata juga masih sulit dimengerti kandungan artinya. Bahkan -- kalau boleh disebut -- inilah kelemahan umum apabila seseorang ingin memahami sepenuhnya

buku ini, bahwa pemahaman dalam bahasa Inggris ternyata lebih memberikan gambaran konkrit daripada padanan Indonesianya.

Buku *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra* terdiri dari sepuluh bagian. Bagian 1 membahas Konsep dan Landasan Penginderaan Jauh. Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau fenomena yang dikaji. Dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik, maka informasi tentang suatu obyek dapat diketahui melalui *pemantulan*, *penyerapan* atau *pentransmisi* sebagai hasil kontak antara gelombang elektromagnetik dengan obyek sasaran. Penginderaan ini dapat dilakukan dari udara atau dari antariksa. Bab pertama buku ini secara luas memberikan pemahaman tentang konsep dan landasan penginderaan sehingga pembaca dapat menangkap maksud dari penginderaan jauh dan memahami pula sistem penginderaan ideal. Atas dasar landasan seperti ini dimungkinkan para ahli di luar bidang teknik dapat menangkap manfaat lain berkaitan dengan bidang yang digeluti.

Mulai Bab 2 hingga Bab 9, pembahasan memang harus disatukan karena pembahasan ini menjadi sangat teknis dan hanya sekelompok kecil orang yang memahami. Tetapi di antara kesulitan pemahaman ini, Bab 3 dan Bab 4 perlu mendapatkan sorotan khusus karena menyangkut penyajian dasar interpretasi foto udara untuk sejumlah terapan dan analisis dari interpretasi foto tersebut. Kedua bab inilah yang dapat menjelaskan keberadaan teknologi Penginderaan Jauh sebagai salah satu katalisator pembangunan. Pembahasan teknis pada Bab 2 ber-

kisar antara alat dasar yang dipergunakan untuk memperoleh foto udara, seperti filter, film dan kamera udara. Keistimewaan bab ini cukup lengkapnya foto-foto kenampakan bumi yang diambil dengan film berwarna. Pada bagian ini juga dibahas tentang fokus, hamparan dan teknik pemrosesan film. Bab 5 membicarakan proses untuk memperoleh pengukuran spasial dan pemetaan dengan foto udara. Bab 6 membahas *optical density* di mana titik-titik di dalam foto udara dapat diukur dan dipergunakan untuk mempelajari sifat pantulan obyek. Jika pada Bab 2 sampai Bab 6 penginderaan jauh yang dilakukan adalah dengan fotografik, pada Bab 7 subyek pembahasan adalah sebaliknya (non-fotografik). Bab 7 menguraikan perolehan maupun analisis data pembesaran termal. Bab selanjutnya membahas tentang perluasan konsep dasar dan teknik bekerjanya pembesaran spektrum termal hingga penyiam multisaluran, dari panjang gelombang ultraviolet sampai termal. Pada bagian ini pembaca awam semakin kesulitan mengerti tentang istilah-istilah teknis dan kontekstual peristilahan tersebut. Tetapi bagi pembaca yang kesehariannya berdekatan dengan teknologi penginderaan, penjelasan dari Bab 2 sampai Bab 9 memberikan wawasan cukup luas -- meskipun penulis buku ini sendiri mengatakan bahwa jika dilihat dari kedalaman, pembahasan buku ini masih dangkal. Secara keseluruhan delapan bab buku ini membahas perkembangan penginderaan dari spektrum elektromagnetik bergelombang pendek hingga gelombang panjang dengan pembahasan dipusatkan pada fotografi dalam daerah ultraviolet, inframerah pantulan, penyiaman termal sampai penginderaan radar pada spektrum gelombang mikro. Sedangkan Bab 10 membahas garis besar penggunaan umum tiap sensor dari antariksa dengan analisis berdasarkan

data satelit Landsat.

Bagi para ahli bidang pertanian, ekonomi, sosial-humaniora dan tata kota, pembahasan Bab 3 dan 4 mampu memberikan inspirasi dalam kerangka pendekatan multidisipliner. Terapan Teknologi Penginderaan Jauh dalam bidang pertanian, kehutanan, sumber daya air, perencanaan kota dan wilayah, ekologi satwa liar, kepurbakalaan, penilaian dampak lingkungan dan lain-lain, menjadi indikator pentingnya teknologi ini dalam keseluruhan proses pembangunan nasional. Bahkan Teknologi Penginderaan Jauh ini dapat menjadi salah satu katalisator pembangunan nasional. Penerapan teknologi ini pada bidang pertanian misalnya, secara cepat mampu mengklasifikasi jenis tanaman, penilaian kondisi tanaman sampai pada penafsiran besarnya produk. Kemampuan teknologi ini dalam menilai kondisi tanaman sangat menguntungkan karena perubahan karakteristik tanaman dan penyakit (hama) yang menyerang dapat diketahui secara dini. Dengan demikian upaya penanggulangan hama pun dapat segera dilakukan. Dengan dininya upaya penanggulangan terhadap hama tersebut, maka produk yang dihasilkan oleh tanaman tersebut akan mempunyai keunggulan komparatif jika sudah dilempar ke pasar.

Penerapan Teknologi Penginderaan Jauh untuk perencanaan kota dan wilayah, sepenuhnya dapat membantu para ahli tata kota. Tata kota yang kacau dan tidak terpantaunya lingkungan-lingkungan kumuh yang marak sebagai salah satu gambaran banyaknya masalah sosial di perkotaan, juga tumbuhnya sentra-sentra industri dan beberapa hal lain yang mengganggu tata kota, dapat segera dipantau oleh teknologi ini. Kecepatan pemantauan ini tentunya juga menghasilkan ketepatan strategi pemecahan masalah. Para ahli ilmu sosial pun dapat memanfaatkan teknologi ini untuk melihat berkembangnya lingkungan-lingkungan kumuh dan selanjutnya mereka dapat memproyeksikan masalah-masalah sosial yang akan muncul dan sekaligus memikirkan strategi pemecahannya. Demikian juga untuk pencemaran lingkungan, teknologi ini dapat memantau secara dini adanya pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai salah satu katalisator pembangunan, teknologi Penginderaan Jauh dapat mengenali kekayaan sumber alam Indonesia dan apabila sumber alam itu diolah dan didayagunakan, berarti akselerasi pembangunan berputar semakin cepat.

Sukardi Rinakit